

SKRIPSI

**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA WATUGEDE**

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon
Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)*



Disusun Oleh

**CHRISTINE CECILIA STEFANIE UTE DOLOROSA
20520154**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK

WISATA WATUGEDE

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul)*

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Disusun Oleh

CHRISTINE CECILIA STEFANIE UTE DOLOROSA
20520154

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2024

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA
Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si.
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa

NIM : 20520154

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan Karya Ilmiah saya selaku penulis, dan bukan karya orang lain. Apabila pernyataan ini tidak benar ditemukan plagiat pada karya lain maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan oleh kampus. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Yogyakarta, 10 November 2024



Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
20520154

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap	: Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
NIM	: 20520154
Telp	: 082157741596
Email	: stefaniechristinececilia@gmail.com
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

" PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA WATUGEDE" beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 06 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
20520154

MOTTO

”Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

(Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa)

“Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian”

(Ir. Soekarno)

“Bangunlah suatu dunia dimana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan”

(Ir. Soekarno)

“Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-ku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau.”

(Yesaya 54:10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan serta-Nya sampai saat ini, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana, walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bangga telah mencapai titik ini, titik dimana skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Keluarga kudus di Nazaret yang telah membimbing dan menyertai saya dalam perjalanan panjang selama saya mengerjakan skripsi ini, sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya bisa melewati segala rintangan dan halangan yang ada didepan saya, dan bisa sampai dititik ini, titik yang mana saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua Saya Papa Stefanus, S.Sos. yang menjadi support sistem terbaik saya dan Mama Bernadeta Buheni yang cintanya sungguh luar biasa, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Terimakasih untuk Abang tercinta dan tersayang Chrissanctus Credo Carnegie S.Hut yang selalu menyemangati saya serta berkat doa dan dukungan saya bisa sampai dititik ini dan bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Terimakasih untuk Adik- adik saya dan keluarga besar saya Rista, Enjeli, Via, Melki, Juan, Madun, Rey, Fera, Emon serta bibi dan paman saya yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses pengerjaan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede (*Penelitian Diskriptif Kualitatif di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul*)”** ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta
3. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dengan sabar, dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya.

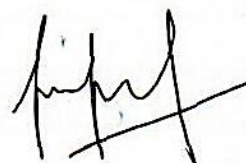
4. Seluruh Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
5. Terimakasih kepada Lurah Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul beserta seluruh staf pemerintah Kalurahan Kedungpoh bersama jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga saya yang terkasih, Ayahanda Stefanus, S.Sos. dan Ibunda Bernadeta Buheni, serta Kakak kandung saya Chrisangtus Credo Carnegie S.Hut.,
7. Terimakasih untuk Adik- adik saya dan keluarga besar saya Rista, Enjeli, Via, Melki, Juan, Madun, Rey, Fera, Emon serta bibi dan paman saya yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses pengerjaan skripsi.
8. Terimakasih untuk sahabat terbaik saya nona pemilik NIM 20520087 Monika Iwan yang kesabaran seluas laut dan samudera yang selalu memberikan semangat untuk saya, terimakasih sudah menjadi rumah yang hanya berupa tanah dan bangunan serta ikut mendaki bukit Watugede (walaupun sampai terjatuh ditangga yang sangat ekstrim). Terimakasih juga telah menjadi bagian perjalanan saya hingga sekarang ini.
9. Terimakasih juga untuk teman Dewi, Putri, Feby, Gracia, Ranti, Lia, Didit, Kak Muti, Dek vina yang sudah setia mendengarkan keluh kesah

saya dan sudah memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terakhir untuk diriku terimakasih sudah menepikan kesedihan dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri berbagai tekanan diluar dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan saya semoga skripsi ini dapat sedikit membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalamnya. Oleh karena itu, masukan-masukan baik berupa kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 November 2024



Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa

20520154

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Literatur Review.....	6
G. Kerangka Konsep.....	13
1. Pengertian <i>Governing</i>	13
2. Pengelolaan	15
3. Pemerintah Kalurahan.....	17
4. Desa Wisata.....	18
5. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).....	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Unit Analisis	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	26

BAB II PROFILE KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	28
A. Sejarah Kalurahan Kedungpoh.	28
B. Visi Dan Misi Kalurahan Kedungpoh.....	31
C. Kondisi Geografis Kalurahan Kedungpoh	31
D. Demografis Kalurahan Kedungpoh.....	33
E. Sosial Ekonomi Kalurahan Kedungpoh	34
F. Kondisi Budaya Kalurahan Kedungpoh.....	37
G. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh	39
H. Kondisi Wisata Desa Kalurahan Kedungpoh.....	41
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA WATUGEDE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	47
A. Pengelolaan wisata Watugede.....	51
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	51
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	54
3. Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	58
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	62
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	75
PEDOMAN WAWANCARA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Informan	24
Tabel 2.1	Data Penduduk Kedungpoh.....	33
Tabel 2.2	Data Agama Kedungpoh	34
Tabel 2.3	Data Penduduk Menurut Mata Pencarian Kalurahan Kedungpoh	35
Tabel 2.4	Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kedungpoh.....	36
Bagan 2.1	Data Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh.....	40
Tabel 2.5	Hasil PADes Tahun 2017-2019 Kalurahan Kedungpoh	43
Tabel 2.6	Hasil PADes Tahun 2020-2023 Kalurahan Kedungpoh	43
Tabel 3. 1	Daftar Pengurus dan Anggota Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede.....	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Data Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh	40
-------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Kedungpoh	32
Gambar 2.2 Balai Budaya Kalurahan Kedungpoh.....	37
Gambar 2.3 Wisata Desa Bukit Watugede	41

INTISARI

Indonesia dikenal kaya akan keindahan alam yang berpotensi sebagai sumber ekonomi melalui pengembangan desa wisata. Namun, pengelolaan objek wisata watugede mengalami penurunan jumlah pengunjung sejak 2019 akibat kurangnya pengelolaan yang aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan governing untuk mengetahui otoritas pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan objek wisata ini, serta menggunakan teori manajemen George Terry yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya proses perencanaan yang tidak matang dan terstruktur untuk pengelolaan wisata, untuk pengorganisasia sudah maksimal diterapkan namun adanya tantangan lain yang terletak pada pengawasan dan pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek pembangunan infrastruktur serta transparansi keuangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian tujuan dalam meningkatkan PADes.

Kata Kunci: *Governing , Pengelolaan Wisata Watugede*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan desa yang memiliki keindahan alam, desa wisata dapat terbentuk dari integrasi akomodasi, fasilitas dan pendukung yang disediakan oleh pemerintah Kalurahan setempat. Wisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keindahan sumber daya alam. Sehingga, Indonesia dikenal memiliki banyak sekali daerah yang menawarkan potensi sebagai destinasi objek wisata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Desa wisata yang tersebar seluruh Indonesia. Pentingnya keindahan sumber daya alam ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Desa wisata dapat menjadi salah satu sumber dalam meningkatkan

dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukannya pengelolaan yang tepat dari pemerintah Kalurahan setempat.

Fenomena tentang desa wisata penting untuk dikaji, pasalnya desa wisata yang merupakan salah satu aset desa diharapkan dapat dikelola dengan tepat agar menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan adanya undang-undang pada pemerintah Kalurahan diberikan hak dan kewenangan dalam mengelola sumber-sumber dan potensi-potensi desa wisata sebagai obyek wisata yang ada di desa.

Menurut Eko Sutoro (2014), peraturan ini memberi peluang berkembangnya kebijakan tata kelola desa secara nasional. Desa mengandung dua asas penting yaitu, Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas. Rekognisi adalah pengakuan negara terhadap hak desa untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa dan tidak lagi diintervensi pemerintah supra desa atau merupakan pengakuan negara terhadap hak asal usul desa. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, dengan adanya kedua asas ini, tugas pemerintah Kalurahan dan tanggung jawab pemerintah Kalurahan semakin bertambah serta lebih berat dari sebelumnya yang hanya

tinggal menunggu pemerintah dari daerah kini harus secara mandiri untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dengan adanya, kedua asas tersebut desa dapat mengatur dan melakukan pengelolaan objek wisata yang dimiliki secara mandiri.

Salah satu destinasi wisata yang mulai berkembang di beberapa daerah adalah kawasan wisata alam, seperti Watugede, yang terletak di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata Watugede ini berdiri sejak tanggal 12 Juni 2012 oleh warga masyarakat Padukuhan Sinom yang sadar akan potensi wilayah tersebut. Semenjak berdirinya wisata Watugede pernah menjadi andalan sebagai sumber PADes sebelum terjadinya pandemi covid-19, namun semenjak ada wabah ini wisata Watugede mengalami penurunan omset dikarenakan sepih pengunjung. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya seluruh wisata mengalami masalah yang sama saat terjadinya pandemi tersebut, tapi ditempat lain pemulihanya cepat diatasi, sementara wisata Watugede belum ada progres lanjutannya.

Ditahun 2022 pemerintah Kalurahan menginisiasi menghidupkan kembali wisata Watugede melalui pernyataan Lurah. Dalam AD ART Lurah berperan sebagai penanggungjawab sementara pihak pengelola adalah Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede. Adapun ADR ART tersebut ditetapkan di Kedungpoh, pada tanggal 12 Juli 2020.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwasanya wisata Bukit Watugede mencapai puncak ketenaran pada tahun

2015. Akan tetapi, mengalami permasalahan yaitu, terjadinya penurunan jumlah pengunjung, karena kurang aktifnya pengelolaan sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan objek wisata sudah tidak berjalan aktif. Terdapat beberapa fasilitas dan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 300 meter menuju objek wisata, tangga, kamar mandi, serta parkir mengalami kerusakan dan tidak dilakukan pembangunan kembali.

Berdasarkan uraian di atas maka studi ini menggunakan pendekatan perspektif *Governing* yaitu mengenai perbuatan pemerintah, dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kalurahan dalam mengelola objek wisata Watugede untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Kedungpoh. Masalah yang penulis dapatkan dari sudut pandang dalam pengelolaan objek wisata Watugede terjadinya penurunan jumlah pengunjung, karena kurang aktifnya pengelolaan sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan objek wisata sudah tidak berjalan aktif.

Sehingga penelitian ini “fokus mengkaji” tentang upaya Upaya Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul yang dilihat dari sistem pengelolaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana Upaya Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa?”

C. Fokus Penelitian

1. Perencanaan dalam kegiatan Wisata Watugede.
2. Pengorganisasian dalam pengelolaan Wisata Watugede.
3. Pelaksanaan para pelaku wisata di Watugede.
4. Pengawasan terhadap kegiatan atau kinerja di Wisata Watugede.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Watugede untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan objek wisata.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu Manfaat Akademis dan Manfaat Teoritis:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi akademis kepada masyarakat atau semua pihak terkait pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Watugede untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede, semoga bisa menjadi landasan dalam menyelenggarakan pengelolaan objek wisata yang efektif dan efisien guna untuk meningkatkan PADes.
- b. Bagi mahasiswa sebagai peneliti, dapat menjadi pengetahuan baru pada masalah yang diteliti.

F. Literatur Review

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Leniwati, D., dan Aisyah, A. Yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Volume 4 No 2 Oktober Tahun (2021) yang berjudul Pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkat Asli Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan pendapatan desa (PADes). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, kepala BUMDes, karyawan, dan masyarakat. Reduksi data, penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian

menyatakan pengelolaan Ekowisata Boonpring sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanan kerto sesuai dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntable, dan sustainable. Pengelolaan Ekowisata Boonpring yang baik diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan dengan menggali potensi desa melalui sektor pariwisata walaupun ada kendala dalam penerapan prinsip partisipatif yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilatih.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marlina, yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5 No 1 Tahun (2019) yang berjudul Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kepastian sumber dana untuk pengelolaan objek wisata Air Panas sehingga dalam pembangunan infrastruktur masih kurang memadai, kurangnya pemeliharaan objek wisata Air Panas, dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengurus objek wisata untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan bahwa pengelolaan objek wisata Air Panas guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan pariwisata menurut Richardson dan Fluker (Pitana, 2009:88). Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum ada realisasi dalam pertemuan sebelumnya dengan Dinas Pariwisata, tidak ada kesepakatan dalam penyusunan visi dan misi pembangunan pariwisata antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat, kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas dan kegiatan pariwisata, pemilik warung tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan berupa meningkatkan komunikasi dengan Dinas Pariwisata, sering melakukan sharing dengan masyarakat, karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai pembangunan objek wisata, mencari investor dan bantuan dari pemerintah daerah, merekrut sumber daya manusia kompeten , menyusun secara tertulis kebijakan tarif masuk ke objek wisata serta visi dan misi pembangunan pariwisata, mendorong wisatawan untuk mempromosikan objek wisata. Kata Kunci: Pengelolaan, Pariwisata, PADes.

3. Penelitian ini yang dilakukan oleh Kadek Aris Puspantari, yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik kontemporer, Volume 2 No 2 Tahun (2022) yang berjudul Pengelolaan Desa Wisata Dalam Rangka

Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Wisata Besan Kabupaten Klungkung. Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian pedesaan baik kehidupan sosial, budaya, adat istiadat serta didukung oleh potensi wisata dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan desa. Desa Besan merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata. Dengan ditetapkannya sebagai Desa Wisata maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan desa wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Pentahelix dimana pengembangan Desa Wisata harus difokuskan pada pengembangan terpadu 5 (lima) elemen penting yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Besan Kabupaten Klungkung. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan penelusuran data online. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Besan dalam rangka pembenahan desa asli di Desa Wisata Besan merupakan pengembangan terpadu dari 5 (lima) unsur penting yang terdiri dari Akademisi, Bisnis,

Komunitas, Pemerintah, dan Media. Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Besan di Kabupaten Klungkung sudah berjalan dengan baik namun masih mengalami kendala.

4. Penelitian ini yang dilakukan oleh Anggi Hermansyah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5 No 3 Tahun (2019) yang berjudul Pengelolaan Objek Wisata Citumang Oleh Karang Taruna Desa Bojong Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pagandaran. Latarbelakang penelitian ini yaitu Masih sering ada wisatawan yang meninggal setiap tahunnya karena tidak diwajibkan memakai jasa pemandu wisata ataupun tidak diwajibkan dalam hal keamanan seperti memakai pelampung ketika berenang, masih sering ada orang luar yang menekan harga lebih murah dari harga standar yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Citumang sehingga turut mengurangi pendapatan, tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Desa setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bahwa pengelolaan objek wisata Citumang oleh karang taruna

Desa Bojong pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan objek wisata menurut Leiper dalam Pitana (2009:80). Namun terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh karang taruna dalam mengelola objek wisata Citumang berupa belum adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, belum adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan kepada karang taruna sehingga pemerintah harus turun tangan atas kejadian yang kurang baik yang menimpa objek wisata Citumang, kurangnya penyertaan modal dalam pembangunan objek wisata Citumang serta kurang ada rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota karang taruna. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak didalamnya termasuk karang taruna dengan member pengarahan kepada masing-masing anggota karang taruna terhadap tugas dan fungsinya, mencari dan dalam menunjang pembangunan objek wisata Citumang. Begitu juga dengan pemerintah Kalurahan yang akan melakukan pengawasan rutin ke lokasi objek wisata Citumang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmiati, Muhammad Massyat, Sri Yuyun, yang dimuat dalam jurnal Pegguruang Tahun (2021) yang berjudul Peran Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana peran dan hambatan apa yang dihadapi pemerintah Kalurahan

dalam mengelola sektor pariwisata Desa Kayuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk memastikan kondisi subjek terutama di alam, berbeda dengan eksperimen, di mana penelitian merupakan alat yang penting. Metode pengumpulan data menekankan bahwa analisis data yang dilakukan dengan triangulasi (koneksi) bersifat induktif, dan temuan kualitatif lebih penting dari pada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengelola objek wisata, serta untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Desa Kayuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah membentuk BUMDes, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Hambatan yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah Infrastruktur/ bangunan jalan Transportasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Bumdes, Pengunjung Musiman, Bencana alam, Adanya covid-19.

Berdasarkan hasil *Literatur Review* di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pengelolaan objek wisata yang berada di desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan “*Governing*” yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah untuk memberikan upaya dalam mengelola objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

G. Kerangka Konsep

1. Pengertian *Governing*

Perbuatan pemerintah atau yang disebut dengan *governing* dalam pengertian dasar adalah penggunaan otoritas politik yang dimiliki dan dipegang oleh pemerintah. *Governing* adalah sebuah kata kerja yang berarti memerintah, dalam pengertian bahasa Indonesia *governing* adalah mengatur dan mengurus. Konsep atau teori *governing* yang dipahami tentunya memiliki proses, fungsi dan hasil (Hidayat, 2022). *Governing* mengandung proses politik, hukum dan administrasi, sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan, hukum dan administrasi. Fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. *Protecting* artinya melindungi rakyat dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* diaplikasikan untuk mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh Pemerintah. Proses pembuatan hukum dan kebijakan merupakan sebuah perbuatan penting yang dilakukan pemerintah dalam governing. Perbuatan memerintah oleh pemerintah tentunya memiliki nilai dan tujuan yang akan dicapai (Eko Sutoro, 2021).

Prespektif *governing* adalah sudut pandang dalam pengelolaan pemerintah Kalurahan dimana terdapat interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai penerima. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari hasil pengelolaan objek wisata, *governing* diaplikasikan untuk memperkuat pemerintah Kalurahan dalam mengatur

dan mengurus desa secara mandiri dan demokratis. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, dan kewenangan desa adalah desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berikut apa yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus terdiri dari beberapa makna yaitu: mengelola aset desa untuk kepentingan umum. Misalnya, desa menetapkan objek wisata menjadi penghasil tetap desa agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik agar tercapainya desa yang mandiri sejalan dengan cita-cita desa pada umumnya.

Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus aset atau hak milik desa, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Saran prasarana desa dapat diambil sebagai contohnya saran prasarana desa merupakan fasilitas hak milik negara sebagai hak kelola desa.

3. Dari konsep teori *governing* yang telah disampaikan di atas mengenai pengertian *governing*, maka dapat disimpulkan bahwa *governing* memiliki hubungan konsekuensi untuk mengurus, membantu dan bertanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Studi ini menggunakan perspektif *Governing* yaitu mengenai perbuatan pemerintah, dengan tujuan untuk mengetahui

pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Watugede untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Kedungpoh.

2. Pengelolaan

a. Pengelolaan

George R. Terry, menjelaskan bahwa manajemen yang baik mencakup beberapa fungsi utama yang harus dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah **perencanaan (*planning*)**, **pengorganisasian (*organizing*)**, dan **penggerakan (*actuating*)**. Berikut adalah penjelasan rinci tentang ketiga fungsi tersebut berdasarkan pandangan George R. Terry:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi yang paling mendasar dalam manajemen. Menurut George R. Terry, perencanaan melibatkan pemilihan fakta-fakta yang relevan, kemudian menghubungkan fakta satu dengan lainnya untuk membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan di masa depan. Dengan perencanaan, manajer dapat merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perencanaan ini meliputi identifikasi tujuan, pembuatan keputusan tentang langkah-langkah yang akan diambil, serta penyusunan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur seluruh kegiatan yang perlu dilaksanakan di dalam suatu organisasi. George R. Terry menjelaskan bahwa dalam fungsi ini, manajer harus membagi tugas dan tanggung jawab antara anggota kelompok kerja serta menetapkan wewenang tertentu. Dengan demikian, setiap anggota tim tahu peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bekerja dengan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian juga mencakup penetapan struktur organisasi yang jelas dan pembagian sumber daya.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan agar anggota organisasi bekerja secara efektif dan efisien. George R. Terry menyatakan bahwa dalam tahap ini, manajer harus memastikan bahwa semua anggota kelompok bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggerakan melibatkan komunikasi, pemberian motivasi, serta pengawasan terhadap kinerja anggota tim. Manajer perlu mengarahkan dan mendorong anggota tim agar bekerja sesuai dengan rencana dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi apakah aktivitas yang sedang dijalankan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan meliputi penentuan hasil yang ingin dicapai, pengukuran kinerja, dan identifikasi penyimpangan yang terjadi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, tindakan korektif harus diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana.

3. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pengelolaan terhadap tanah kas desa. Sebagai institusi modern, pemerintah Kalurahan tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Pemerintah Kalurahan dalam arti administratif, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri (Hidayat, A. 2022).

Dalam mewujudkan visi dan misi agar terlaksananya urusan atau kepentingan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sesuai dengan perda nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Kalurahan maka pemerintah daerah yang ada di kabupaten dan pemerintah Kalurahan harus selaras dengan perangkat di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perubahan yang dilakukan diantaranya perubahan sebutan desa menjadi Kalurahan, perubahan yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas organisasi, dimensi kelembagaan, dan tata kerja.

Penataan kelembagaan pemerintah Kalurahan diselenggarakan untuk mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan istimewa (Tomi, 2023). Pemerintah Kalurahan berfungsi mengatur dan mengelola aset yang dimiliki desa, salah satunya yaitu objek wisata yang dimiliki. Sesuai dengan aturan yang telah disusun oleh pemerintah Kalurahan, pelayanan merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan kepada masyarakat yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan obyek wisata.

4. Desa Wisata

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.40 Tahun 2020 Pasal 1 tentang kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata, menetapkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hasmiati, 2021).

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Desa wisata/kampung wisata, yang selanjutnya disebut deswita/kawita adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa/kelurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

Menurut Joshi desa wisata (*Rural Tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan alam pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata (Priasukmana dan Mulyadin, 2001). Menurut undang-undang dan para ahli menjelaskan bahwa desa wisata mencakup unsur-unsur atraksi, akomodasi, tradisi dan fasilitas pendukung di

dalam wilayah desa/kelurahan tersebut. Masyarakat memiliki hak dalam pelaksanaan dan pengelolaan desa wisata.

Dalam pengelolaan desa wisata yang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada di desa merupakan bagian dari wujud dari asas subsidiaritas yang terpadat pada Undang-Undang tentang Desa. Asas Subsidiaritas menempatkan desa sebagai subjek karena desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat. Berbeda halnya jika wisata desa, maka akan memiliki makna lain, sebab desa wisata menempatkan desa sebagai subjek sedangkan wisata desa menempatkan desa sebagai objek (Sugiman, 2018).

5. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha milik desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan Asli Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf (a), Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa (PADes) meliputi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan terhadap PADes, dengan berbagai upaya seperti melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam yang dimiliki desa, dimana dapat membantu meningkatkan kesejahteraan

kehidupan masyarakat (Marlina,2019). Peningkatan PADes merupakan suatu upaya, usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menambah, menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki desa (Mukhirto, 2022).

Desa berhak untuk mengali potensi yang dimiliki dan mengelolanya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), salah satu potensi yang dapat ditingkatkan yaitu di bidang sektor pariwisata. Berdasarkan dengan laporan kinerja dari Kementrian Pariwisata Indonesia pada tahun 2014 sektor pariwisata memberikan dampak PDB nasional sebesar 4,01%, kemudian sektor pariwisata juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,32 juta orang. Pada tahun 2014 devisa negara mengalami peningkatan menjadi 11,116 juta USD (Aji, 2022).

Berdasarkan dengan data tersebut memberikan penjelasan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi cukup besar untuk perekonomian di Indonesia. Pengelolaan desa wisata termasuk dalam bagian Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset. Dengan adanya pengelolaan yang tepat desa yang memiliki potensi dapat berkembang menjadi desa wisata yang akan menarik berbagai pengunjung, kemudian pengunjung akan masuk dengan membayar tiket masuk, selain itu masyarakat setempat dapat membuka usaha seperti warung agar wisatawan yang masuk dapat menikmati keindahan alam, tanpa khawatir kekurangan makanan atau minuman. Dengan adanya wisata desa ini memungkinkan masyarakat mendapatkan penghasilan, dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang artinya penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang dilakukan secara deskripsi. Deskripsi adalah gambaran berupa kata-kata dan bahasa (Moleong, 2018:6).

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi objek wisata watugede yang pernah menjadi kebanggaan, tetapi kini sudah memudar seiring waktu. Dulunya, tempat ini dipenuhi dengan banyaknya pengunjung dan wisatawan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Namun, sejak Pandemi Covid-19 objek wisata ini perlahan kehilangan aktivitasnya dan fasilitas-fasilitas yang berada di watugede itu ada yang sudah rusak seperti gazebo, kincir angin, tangga, lift, kamar mandi dan ada papan informasi yang terlihat sangat usang. Kondisi watugede ini disebabkan karena kurangnya perawatan dan pengelolaan dari pemerintah Kalurahan kedungpoh. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah keadaan objek wisata watugede. Secara spesifik penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan tentang Bagaimana Penguatan Kapasitas Pemerintah Kalurahan Terhadap Pengelolaan Desa Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti (Suprayogo dan Troboni 2001: 48). Unit analisis suatu penelitian berupa individu, kelompok, organisasi dan waktu tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Dengan Metode Kualitatif maka Unit analisisnya adalah obyek dan subyek yang akan diteliti:

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut, (Arikunto, 2009:20). Obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu, Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, alasan memilih subyek penelitian di atas karena subyek berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan subyek mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Tabel 1.1 Data Informan

No.	N ama	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Status
1.	Dwiyono	56	SLTA	Lurah
2.	Ruslan Mudzakir	42	S1	Carik
3.	Yusuf Efendi	39	S1	Tata Laksana
4.	Suparman	54	SLTA	Dukuh
5.	Widiyanto	48	SLTA	Masyarakat
6.	Riko	25	SLTA	Ketua Karangtaruna
7.	Senioto	58	SLTP	Ketua RT 01
8.	Suwardi	60	SD	Masyarakat

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Selaitu, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik dari skripsi. Dengan pemilihan lokasi ini peneliti diharapkan dapat menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Mucthar, 2015;243).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh data secara benar-benar dan valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi (Yusanto, 2019), sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi disebut pula sebagai pengamatan merupakan memungkinkan pengamatan untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penelitian, hidup saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu (Moleong, 2018). Selain itu, bawah pengamatan atau suatu Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sesuatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2016). Jadi observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan itu sendiri juga perilaku individu yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, mengkaji Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul prespektif Governability di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

b. Wawancara

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara bertahap (*in-depth*). Wawancara yang penelitian gunakan adalah Metode wawancara yang mendalam,

secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2017:111). Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung (Bungin, 2017).

Dalam wawancara, penelitian menggali sedalam mungkin data yang terkait dengan masalah yang diteliti ialah Kapasitas Pemerintah Kalurahan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Watugede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. yang terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwo, Pangripta, Danarta serta masyarakat Kalurahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2015). dokumentasi-dokumentasi dalam penelitian ini adalah profil Kalurahan Kedungpoh, dan Peraturan Kalurahan tentang wisata Watugede.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2017), teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memahami

dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Teknik ini meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian.
- b. Penyajian data, data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk naratif yang memudahkan peneliti dalam melihat pola atau hubungan yang muncul.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan menghubungkannya dengan teori atau konsep yang ada. Proses ini bersifat interaktif dan terus berlangsung selama penelitian.

BAB II

PROFILE KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Kedungpoh.

Kalurahan Kedungpoh merupakan bagian dari Kabupaten Gunungkidul, secara otonomi adalah Kalurahan yang berpemerintahan sejak tahun 1911. Wilayah Kedungpoh merupakan bagian dari Kademangan Kedungkeris (menurut cerita/kesaksian para sesepuh Kalurahan). Pada masa kolonial Hindia Belanda, kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai bagian wilayah yaitu Katumenggungan Gunungkidul. Katumenggungan Gunungkidul kemudian membentuk Kalurahan- Kalurahan yang salah satunya adalah Kalurahan Kedungpoh. Hal ini diperkuat oleh para pelaku sejarah bahwa Beslit/SK/Serat Kekancingan Lurah yang pertama pada tahun tersebut (1911) yakni Eyang Lurah Karto Rejo yang merupakan pemimpin pertama Kalurahan Kedungpoh.

Dengan demikian ada pertimbangan dari beberapa tokoh bahwa Kalurahan Kedungpoh ada sejak adanya pemerintahan Kalurahan pada tahun 1911. Sumber (pembuktian) tentang pemerintahan Kalurahan Kedungpoh pada tahun 1911 belum bisa menemukan secara Deyure keberadaan SK tersebut, tetapi secara Defacto telah banyak kesaksian. Dan pembenaran dari tokoh tetua Kalurahan Kedungpoh, yang secara formal Pemerintah Kalurahan Kedungpoh telah menggali sejarah secara langsung dengan melalui investigasi dalam agenda forum penggalian sejarah Kalurahan Kedungpoh pada Januari 2008. Tokoh-tokoh yang hadir sebagai Narasumber dalam agenda tersebut, antara

lain: Pawiro Wigno (mantan Dukuh Kedungpoh Lor), Slamet Purwo Diwarno (mantan Dukuh Nglorog), Sukino (mantan Dukuh), Noto Wiyono (mantan Dukuh), Ngatmo Nado (tokoh tetua desa), Muhadi (mantan abdi Lurah Karto Rejo), Ibu Samirah (istri mantan pamong desa), Doto (tokoh desa). Kegiatan ini difasilitasi dan inisiatif dari pemerintah Kalurahan Kedungpoh pada waktu itu dipimpin oleh Edi Susilo sebagai Lurah, dibantu oleh Joko Santoso sebagai sekretaris Kalurahan, dan Mugiharto sebagai Ekobang Desa Kedungpoh yang berperan sebagai notulis dalam forum tersebut.

Awalnya tidak ada yang tahu tentang keberadaan masyarakat Kedungpoh namun dengan keberadaan peninggalan petilasan yang ada di Kedungpoh secara otomatis membuktikan bahwa sebelum terbentuknya Kalurahan Kedungpoh sudah ada komunitas masyarakat yang hidup pada waktu itu. Terbukti dengan adanya peninggalan (petilasan pesarehan kwasen). Namun ada cerita lagi bahwa, ketika terjadi huru-hara di Keraton Surakarta ada sekelompok masyarakat wilayah Tembayat (sekarang Bayat) yang datang ke wolauah Kedungpoh yang dipimpin oleh Kyai Ahmad Dalem dan menetap di suatu wilayah yang sekarang namanya padukuhan Kedungpoh Kidul. Pada waktu itu Kyai Ahmad Dalem berprofesi sebagai Empu (pembuat pusaka). Bekas dari tempat tersebut berada di RT 02/01 Kedungpoh Kidul. Ahmad Dalem mempunyai putra yang bernama Jumpu alias Ahmad Rifa'i. Sedangkan Ahmad Rifa'i mempunyai teman seperjuangan yang bernama Ahmad Kiramu yang merupakan seorang pelarian karena menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda dari wilayah Gunungkidul bagian selatan. Ahmad Kiramu

inilah yang sering disebut masyarakat sekarang sebagai penyebar agama islam di Kedungpoh pada khususnya dan wilayah Kecamatan Nglipar pada umumnya.

Air merupakan sumber kehidupan masyarakat. Cara memperoleh air pada waktu itu dengan cara alami dan tradisional. Belum ada sumur apalagi ada Pam seperti sekarang ini. Masyarakat hanya memanfaatkan sumber mata air yang ada. Salah satunya adalah genangan air (kedung) yang terletak di Kedungpoh Kidul. Di samping Kedung tersebut ada sebuah pohon Poh (Palem). Dari pola kehidupan waktu itu, masyarakat sering menyebut daerah tersebut dengan sebutan Kedungpoh. Karena banyaknya warga yang memanfaatkan air tersebut, lambat laun nama Kedungpoh menjadi nama Kalurahan Kedungpoh hingga saat ini.

Cerita tersebut menjadi bahan kajian oleh masyarakat, tokoh, dan Pemerintahan Kalurahan dalam menggali sejarah berdirinya (adeking) Kalurahan Kedungpoh. Masyarakat Kalurahan Kedungpoh sudah ada sebelum adanya Beslit/SK/Serat Kekancingan Lurah, terbukti dengan sejarah berupa petilasan-petilasan dan nama kampung yang ada di Kalurahan Kedungpoh, seperti petilasan : Pasareyan Kwasen, Kampung Tambran, Kampung Nanasan, Kampung Dawung, Alas Parangan, Kampung Ringin Putih, Kampung Penthuk, Alas Cering, Sungai Kedung Gender, Grumung Gojo, dan sebagainya.

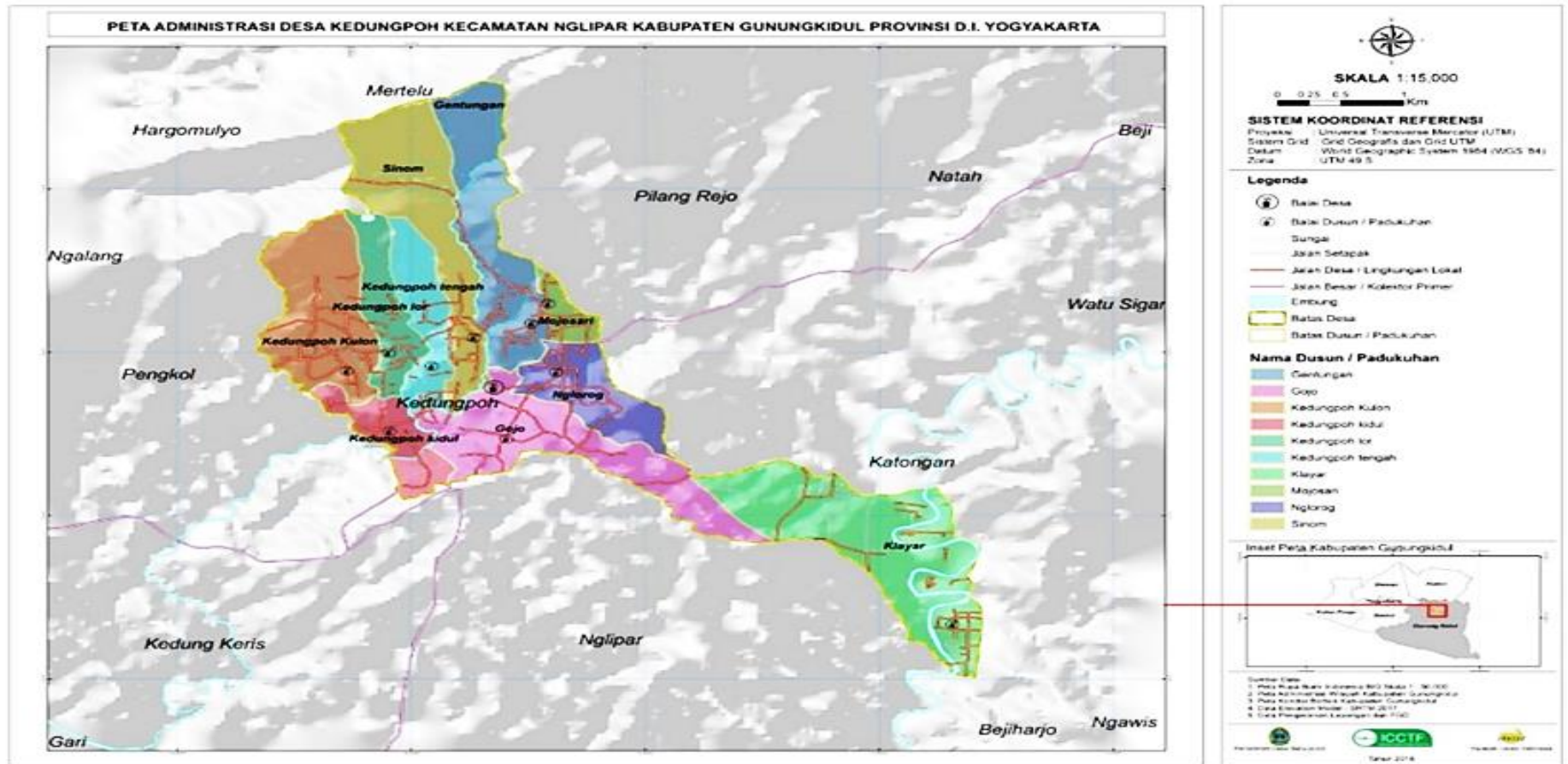
B. Visi Dan Misi Kalurahan Kedungpoh

1. Visi: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul Yang Bermartabat Tahun 2026”
2. Misi: “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Dinamis”

C. Kondisi Geografis Kalurahan Kedungpoh

Kalurahan Kedungpoh memiliki jarak sekitar 10 Km dari Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunungkidul ke arah utara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Nglipar. Mata pencaharian penduduknya adalah mayoritas bertani.

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Kedungpoh



Sumber: Data monografi Kalurahan Kedungpoh 2023

Batas Wilayah Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari
- Sebelah Timur : Kalurahan Katongan
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglipar
- Sebelah Barat : Kalurahan Pengkol

Secara geografis, Kalurahan Kedungpoh berada di wilayah yang strategis dengan batas-batas administratif yang menghubungkan berbagai Kalurahan lain baik dari Kapanewon yang sama maupun yang berbeda. Wilayah ini memiliki karakteristik hubungan administratif dan geografis yang erat dengan sekitarnya.

D. Demografis Kalurahan Kedungpoh

Berdasarkan data yang diperoleh, Kalurahan Kedungpoh tahun 2024, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yakni 6.731 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.340 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.391 jiwa, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Data Penduduk Kedungpoh

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Perempuan	3.391
2.	Laki-Laki	3.340
Jumlah		6.731

(Sumber Data : Monografi Kalurahan Kedungpoh 2023)

Berdasarkan data dari tabel di atas , terlihat bahwa jumlah penduduk Kalurahan Kedungpoh yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 3.340 jiwa (49,62 %) dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 3.391 (50.38%).

Berikut ini adalah tabel yang mendeskripsikan tentang jumlah Agama dan kepercayaan di Kalurahan Kedungpoh sagai berikut :

Tabel 2.2 Data Agama Kedungpoh

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	6.298
2	Kristen	53
3	Katolik	280
	Jumlah	6.731

(Sumber Data Monografi Kalurahan Kedungpoh 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk di Kalurahan kedungpoh mayoritas menganut agama islam dengan jumlah 6.298 orang dan presentase (99,60%) sedangkan agama lain seperti kristen dan katolik hanyalah 0,24% sampai 0,16% namun Kalurahan Kedungpoh memiliki kerukunan dan toleransi agama sangat tinggi, secara tidak langsung menciptakan nilai sosial dan gotong royong yang sangat baik dalam lingkungan maupun terhadap Kalurahan Kedungpoh.

E. Sosial Ekonomi Kalurahan Kedungpoh

Keadaan sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan kehidupan dalam bermasyarakat, dimana terjadinya interaksi antar individu dengan individu lainnya yang saling membutuhkan sehingga terjadinya proses komunikasi. Keadaan sosial di Kalurahan Kedungpoh menunjukkan bahwa penduduk Kalurahan Kedungpoh memiliki interaksi yang baik antar sesama penduduk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan gotong-royong dan setiap penduduk memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari investigasi aspek ekonomi dan mata pencaharian di Kalurahan Kedungpoh sangat bervariasi, tetapi mayoritas dari mata pencaharian masyarakat Kalurahan Kedungpoh adalah berdagang atau penjual jasa yang didominasi oleh warga masyarakat pendatang karena mengingat banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Hasil Data 2024 menunjukkan bawah :

Tabel 2.3
Data Penduduk Menurut Mata Pencarian Kalurahan Kedungpoh

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57
2.	ABRI	10
3.	Polisi	15
4.	Karyawan Swasta	320
5.	Wiraswasta/pedagang	1.140
6.	Petani	2.360
7.	Pertukangan	20
8.	Buruh tani	2.180
9.	Buruh harian lepas	170
10.	Pensiunan	46
11.	Perangkat desa	21
12.	Guru	38
13.	Sopir	15
14.	Lainnya	339
	Jumlah	6.731

(Sumber: Data Monografi Kalurahan Kedungpoh 2023)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Kedungpoh berprofesi sebagai petani dibandingkan pekerjaan yang lain dengan jumlah 2.360 orang atau setara dengan (34.03%) . Maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat cukup variasi dan hal ini

menunjukkan bahwa kualitas kerja yang dimiliki masyarakat di Kelurahan Kedungpoh sudah cukup baik. Harapannya dengan mata pencaharian yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel 2.4
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kedungpoh

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum tamat SD	1.540
2.	SD	1.480
3.	SMP	2.350
4.	SMA	1.181
5.	D1-D3	60
6.	S1-S3	120
	JUMLAH	6.371

(Sumber: Data Monografi Kelurahan Kedungpoh 2023)

Berdasarkan pada di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Kedungpoh memiliki tingkat pendidikan dasar hingga menengah, yaitu tamat SD, SMP, atau SMA. Hanya sebagian kecil penduduk yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti diploma atau sarjana. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kelurahan Kedungpoh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

F. Kondisi Budaya Kalurahan Kedungpoh

Gambar 2.2

Balai Budaya Kedungpoh



(Sumber Data : <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id.2024>)

Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, Balai Budaya berlokasi di RT 03 RW 01, Padukuhan Kidul, Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Akses menuju Balai Budaya sangat mudah dijangkau, lokasinya yang berada di dekat Balai Dusun Kedungpoh Kidul membuatnya mudah ditemukan oleh wisatawan. Balai Budaya didirikan kira-kira pada tahun 2013. Pendiriannya berawal dari adanya keinginan masyarakat untuk membuat suatu tempat berkumpul bagi masyarakat Dusun Kedungpoh Kidul serta tempat untuk mementaskan kesenian-kesenian warga. Akhirnya aspirasi tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, lalu kemudian oleh Pemerintah Kalurahan Kedungpoh balai tersebut akhirnya difungsikan sebagai Balai Budaya Desa Kedungpoh, bukan lagi hanya sebatas Balai Dusun saja.

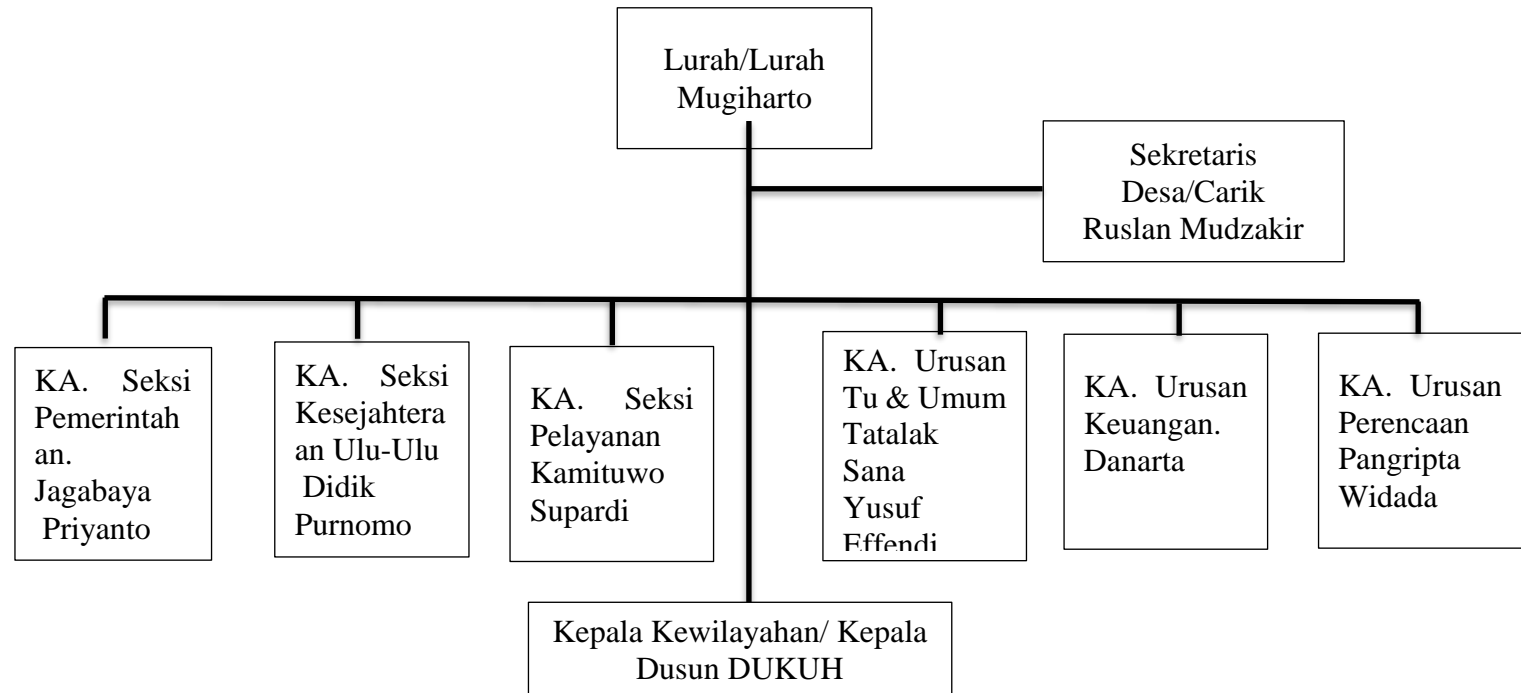
Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan di Balai Budaya, contohnya menyaksikan pentas gejog lesung, jathilan, wayang cakruk, hingga melakukan homestay. Namun, selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Balai Budaya dapat meminta pengurus Balai Budaya untuk menyiapkan kegiatan sesuai dengan keinginan para wisatawan, misalnya kegiatan bercocok tanam dan budidaya tanaman. Guna mendukung pengembangan wisata, Balai Budaya telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai bagi wisatawan. Fasilitas tersebut di antaranya adalah rumah limasan, rumah panggung, kamar mandi, dan masjid yang berada di dekat lokasi. Selain itu, dikarenakan Balai Budaya masih dalam tahap pengembangan, maka setiap kunjungan wisatawan ke Balai Budaya tidak dikenakan biaya tetap melainkan cukup dengan sumbangan seikhlasnya ke kas Desa.

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa, Budaya sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok masyarakat pada hakikatnya memang patut dilestarikan keberadaannya. Selain diwariskan antar generasi ke generasi di dalam kelompok masyarakat tempat dimana budaya tersebut lahir, budaya juga dapat dilestarikan dengan cara memperkenalkannya kepada masyarakat di luar pemilik budaya tersebut. Pelestarian budaya, khususnya budaya Jawa, oleh masyarakat Desa Kedungpoh salah satunya dilakukan dengan cara membangun suatu tempat untuk mementaskan budaya-budaya tersebut. Tempat tersebut dinamakan Balai Budaya.

G. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu, Kalurahan Kalurahan Kedungpoh adalah Kalurahan/Desa yang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagan 2.1
Data Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh



(Sumber Data Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh 2024)

Berdasarkan bagan 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh di atas, bahwa Lurah (Lurah) dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik), dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan(Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU Dan Umum (Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan (Danarta), Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Dusun (Dukuh) yang ada di Kalurahan Kedungpoh juga diketuai oleh satu Kepala Dusun. Dengan Struktur Bagan tersebut peneliti bisa melihat dan mengenal staf Kalurahan Kedungpoh yang ada di Kalurahan Kedungpoh.

H. Kondisi Wisata Desa Kalurahan Kedungpoh

Gambar 2.3

Wisata Desa Bukit Watugede



(Sumber Data : <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id.2024>)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, Objek wisata Bukit Watugede Gunung Kidul berada di Padukuhan Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi ini bisa dicapai dari pusat D.I Yogyakarta dengan mengikuti rute dari kota Yogyakarta ke arah pertigaan sambi pitu lalu ambil belokan ke kiri hingga bertemu pertigaan nglegi. kemudian, dari pertigaan nglegi ambil ke arah kanan hingga menemukan pertigaan setelah hutan kayu putih. ambil belokan ke kiri hingga bertemu balai Kalurahan kedungpoh. Selanjutnya, dari Balai Kalurahan Kedungpoh, ambil belokan ke kiri hingga menemukan tanjakan. Tanjakan ini memiliki gapura dari bahan bambu. Kemudian, dari gapura ambil belokan ke kanan dan ikuti jalan tersebut hingga sampai di objek wisata Bukit Watugede. Maka dari itu, pengunjung tidak perlu cemas akan kehabisan uang saku saat berkunjung ke Bukit Watugede ini karena objek wisata ini tidak mematok tarif yang mahal. Pengunjung hanya tinggal menyiapkan Rp 5.000 saja per orang.

Maka dapat disimpulkan bahwa, penjabaran di atas merupakan rute untuk menuju ke objek wisata ini. Rute ini terbilang cukup sulit aksesnya karena jalanan akan berupa tanjakan dan turunan berbatu. Sebaiknya sebelum berkunjung ke sana pastikan kondisi kendaraan dan fisik memang sedang prima agar bisa menikmati suasana dengan lebih nyaman. Bawa juga beberapa bekal makanan untuk berjaga-jaga jika kelaparan di tengah jalan. Anda juga bisa berkunjung ke objek wisata lainnya di Gunung Kidul seperti Air Terjun Luweng Sampang, pantai, dan juga Embung Nglanggeran.

Pengelolaan Hasil Data PADes tahun 2017-2023 Kalurahan Kedungpoh

Tabel 2.5
Hasil PADes Tahun 2017-2019 Kalurahan Kedungpoh
(Sebelum Pandemi Covid-19)

No	PA Kal. Murni	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan sewa aset desa	9.520.000	11.650.300	4.500.000
2	Bagi hasil BUMDes	11.390.345	6.950.480	3.500.734
3	Pendapatan wisata	8.490.600	18.600.780	19.320.766
	Jumlah	29.400.945	37.201.605	27.321.500

Tabel 2.6
Hasil PADes Tahun 2020-2023 Kalurahan Kedungpoh
(Setelah Pandemi Covid-19)

No	PA Kal. Murni	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan sewa aset desa	7.890.000	6.700.000	12.500.000	10.100.000
2	Bagi hasil BUMDes	7.489.000	5.730.870	8.740.674	11.689.270
3	Pendapatan wisata	321.000	259.000	4.560.000	3.625.700
	Jumlah	15.700.000	12.689.870	25.800.674	25.414.700

(Sumber Data : <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id.2024>)

Pendapatan Kalurahan Watugede menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, pada tahun 2017, pendapatan mencapai Rp29.400.945, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan pendapatan menjadi Rp27.321.500, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi ekonomi lokal.

Selama masa pandemi Covid-19, pendapatan Kalurahan Watugede mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2020, pendapatan turun menjadi

Rp15.700.000, mencerminkan dampak langsung dari pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan ini menunjukkan betapa rentannya pendapatan Kalurahan terhadap situasi darurat kesehatan global.

Pada tahun 2021, pendapatan kembali menurun menjadi Rp12.689.870, yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh berlanjutnya pembatasan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun, pada tahun 2023, terdapat tanda-tanda pemulihan dengan pendapatan meningkat menjadi Rp25.414.700. Meskipun belum mencapai level sebelum pandemi, angka ini menunjukkan bahwa Kalurahan Watugede mulai pulih dan beradaptasi dengan kondisi baru pasca-pandemi.

Sehingga Secara keseluruhan, analisis pendapatan Kalurahan Watugede menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan, namun ada harapan untuk pemulihan di masa depan.

Pengelolaan Objek Wisata Watugede Tahun 2017-2023

No	Tahun	Hasil (Rp)
1	tahun 2017	18.490.600,00
2	tahun 2018	18.600.780,00
3	tahun 2019	19.320.766,00
4	tahun 2020	321.000,00
5	tahun 2021	259.000,00
6	tahun 2022	4.560.000,00
7	tahun 2023	3.625.700,00

(Sumber Data : <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id.2024>)

Pendapatan hasil desa yang bersumber dari pengelolaan objek wisata Watugede di Kalurahan Kedungpoh menunjukkan adanya penurunan yang

signifikan dalam jumlah pendapatan antara tahun 2017 dan 2024. Pada tahun 2017, pendapatan dari wisata Watugede tercatat sebesar Rp18.490.600,00. Namun, pada tahun 2024, pendapatan tersebut mengalami penurunan drastis menjadi Rp1.725.000,00. Penurunan ini sangat mencolok dan dapat dihubungkan dengan beberapa faktor, terutama dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia mulai tahun 2020. Pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada sektor ekonomi, terutama pariwisata. Banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup atau dibatasi operasionalnya untuk mencegah penyebaran virus, dan watugede tidak terkecuali. Penutupan ini menyebabkan hilangnya pendapatan dari pengunjung yang biasanya datang untuk menikmati keindahan alam dan fasilitas yang ditawarkan.

Selain itu, setelah pandemi ada beberapa tempat wisata mulai dibuka kembali, banyak orang masih ragu untuk melakukan perjalanan atau berwisata, terutama di tempat-tempat yang ramai. Hal ini berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung ke watugede, yang berimbas langsung pada pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk, layanan, dan fasilitas lainnya. Di samping itu, adanya pengelolaan wisata di Kalurahan Kedungpoh menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan kondisi baru pasca-pandemi. Misalnya, ada kebutuhan untuk meningkatkan protokol kesehatan, memperbaiki fasilitas, atau melakukan promosi yang lebih agresif untuk menarik pengunjung kembali. Jika tidak ada langkah strategis yang diambil, maka pendapatan dari sektor wisata akan terus tertekan.

Secara keseluruhan, penurunan pendapatan dari pengelolaan wisata watugede di Kalurahan Kedungpoh dari tahun 2017 ke tahun 2023 mencerminkan dampak yang mendalam dari pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Hal ini menekankan pentingnya strategi pemulihan yang efektif dan inovatif untuk mengembalikan daya tarik wisata, serta meningkatkan pendapatan desa dari sektor ini di masa depan.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA WATUGEDE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Wisata Bukit Watugede yang terletak di Padukuhan Sinom, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, merupakan potensi alam yang memiliki peluang besar untuk dijadikan objek wisata. Padukuhan Sinom, dengan jumlah Wisata Bukit Watugede yang terletak di Padukuhan Sinom, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, merupakan potensi alam yang memiliki peluang besar untuk dijadikan objek wisata. Padukuhan Sinom, dengan jumlah penduduk sekitar 708 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, memiliki berbagai tantangan dalam mengelola potensi wisata ini, terutama dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

Menanggapi hal tersebut, beberapa pemuda di Padukuhan Sinom membentuk Kelompok Sadar Wisata dengan tujuan mengelola dan mengembangkan Bukit Watugede menjadi kawasan wisata yang berdaya saing, khususnya di zona utara Kabupaten Gunungkidul. Kelompok ini mulai bergotong royong untuk menata kawasan wisata, termasuk memperbaiki akses jalan menuju puncak bukit dan membangun fasilitas penunjang seperti gazebo. Hingga saat ini, sudah terbangun tiga gazebo di puncak bukit serta akses jalan berupa tangga yang mempermudah pengunjung untuk naik menuju puncak Bukit Watugede.

Penduduk sekitar 708 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, memiliki berbagai tantangan dalam mengelola potensi wisata ini, terutama dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Menanggapi hal tersebut, beberapa pemuda di Padukuhan Sinom membentuk Kelompok Sadar Wisata dengan tujuan mengelola dan mengembangkan Bukit Watugede menjadi kawasan wisata yang berdaya saing, khususnya di zona utara Kabupaten Gunungkidul. Kelompok ini mulai bergotong royong untuk menata kawasan wisata, termasuk memperbaiki akses jalan menuju puncak bukit dan membangun fasilitas penunjang seperti gazebo. Hingga saat ini, sudah terbangun tiga gazebo di puncak bukit serta akses jalan berupa tangga yang mempermudah pengunjung untuk naik menuju puncak Bukit Watugede.

Namun ketenaran wisata Watugede tidak bertahan lama, ditahun 2019 dimana seluruh dunia mengalami masalah kesehatan yang cukup besar yaitu munculnya pandemi COVID-19. Pandemi ini mengancam berbagai sektor, baik ekonomi pun sosial. Larangan beraktifitas di luar rumah oleh pemerintah harus dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai saat itu wisata Watugede sepih pengunjung dan berlangsung hingga sekarang.

Sejak berdirinya wisata Watugede yaitu tahu 2012, belum diatur secara jelas mengenai pihak pengelolanya. Hingga pada tahun 2020 pemerintah bersama pengelola merumuskan AD ART terkait pengelolaan wisata tersebut. Di dalam AD ART memuat aturan dasar, mulai dari pembentukan nama, pembentukan struktur untuk pengelola, serta aturan lain mengenai keberlangsungan wisata Watugede.

Berikut adalah profil kelompok pengelola wisata Watugede :

Nama Kelompok : Pengelola wisata Bukit Watugede

Alamat Sekretariat : Sinom RT 06/05 Kalurahan Kedungpoh

Tanggal Berdiri : 12 Juni 2012

Nama Ketua : Sunarno

Pelindung : Dwiyono (Lurah Kedungpoh)

Penasehat : Suparman (Dukuh Sinom)

Jumlah Anggota :25 orang

Ruang Lingkup Kegiatan : Mengelola lokas wisata Bukit Watugede Sinom
Kedungpoh Nglipar Gunungkidul.

Tabel 3. 1 Daftar Pengurus dan Anggota Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Dwiyono	L	Pelindung
2	Suparman	L	Penasehat
3	Sunarno	L	Ketua I
4	Sugiyono	L	Ketua II
5	Priyo Nugroho	L	Sekretaris I
6	Eko Prasetyo	L	Sekretaris II
7	Yusuf Efendi	L	Bendahara I
8	Sutar	L	Bendahara II
9	Suradi	L	Bidang Sarana Dan Prasarana
10	Rahmad Triyono	L	Bidang Sarana Dan Prasarana
11	Sudiyono	L	Bidang Humas
12	Sugiyanto	L	Bidang Humas
13	Supadi	L	Bidang Logistik
14	Rubiyono	L	Bidang Logistik

15	Hari Setyawan	L	Bidang Keamanan
16	Sumyar	L	Bidang Keamanan
17	Tugimin	L	Bidang Keamanan
18	Khoiriyatul Affrida	P	Anggota
19	Faigah Qotrun Nada	P	Anggota
20	Alfiah Nur Fatimah	P	Anggota
21	Faridatul Hidayah	P	Anggota
22	Arina Salsabila	P	Anggota
23	Anggita Nur Fadlilah	P	Anggota
24	Ifana Rosisa Nafisa	P	Anggota
25	Nabisa Anas Tasya	P	Anggota

Sumber: Data ART Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede Tahun 2020

Dari data diatas peneliti melihat bahwa, Pengelola objek wisata Bukit Watugede adalah Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede, yang terdiri dari anggota-anggota yang terorganisir. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 dan memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai individu dalam pengelolaannya. Ketua kelompok ini adalah Sunarno, dengan beberapa pengurus lain seperti ketua II, sekretaris, bendahara, serta anggota yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, seperti sarana dan prasarana, humas, logistik, dan keamanan. Secara keseluruhan, kelompok ini beranggotakan 25 orang.

Fungsi pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Bukit Watugede dapat dilihat melalui peran Pelindung yang dipegang oleh Dwiyono, yang merupakan Lurah Kedungpoh. Secara umum, peran pemerintah Kalurahan lebih bersifat pendamping dan fasilitator, serta memberikan arah dan dukungan terhadap keberlanjutan objek wisata tersebut agar tetap berkembang. Pihak pengelola wisata dengan pemerintah Kalurahan memiliki hubungan bersifat sinergis dan kolaboratif.

Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan administratif, moral, dan pengawasan, sementara kelompok pengelola wisata bertanggung jawab dalam mengelola operasional objek wisata. Secara keseluruhan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan objek wisata Bukit Watugede, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

A. Pengelolaan wisata Watugede

1. Perencanaan (*Planning*)

Wisata Watugede mulanya berdiri atas dasar kesadaran masyarakat yaitu kaum muda yang berada di Padukuhan Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Mereka membentuk kelompok sadar wisata guna untuk mengelola potensi alam tersebut menjadi tempat wisata yang memberikan kontribusi terutama untuk peningkatan ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kalurahan juga memiliki keinginan untuk mengelola wisata tersebut secara maksimal, karena berdasarkan AD ART Lurah menjabat sebagai Pelindung walaupun bukan pengurus inti Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede, namun fokus perhatian pemerintah hingga kini masih diperuntukan pada wisata Lumbu Mataram. Wisata Watugede sempat ramai pengunjung sejak tahun 2014 sampai 2017, kemudian mulai menurun hingga vakum karena wabah covid-19 hingga sekarang. Pemerintah Kalurahan berencana untuk melakukan pembenahan objek wisata, hal ini diungkapkan langsung oleh Lurah pada saat wawancara. Berikut hasil wawancara dengan Dwiyono sebagai Lurah Kalurahan Kedungpoh;

“Pada tahun 2020 saya selaku Lurah Kalurahan Kedungpoh, pada tahun tersebut terjadi wabah Covid-19, pada saat itu semua masyarakat dilarang untuk beraktivitas diluar rumah. Dan disaat yang sama wisata Watugede juga mengalami dampak yang cukup besar yaitu, sepih pengunjung yang juga mematikan aktifitas yang dilakukan di tempat tersebut. Berangkat dari masalah itu, saya selaku lurah akan berupaya membangun lagi di tahun 2025 yang akan datang ini. Sehingga pada tahun 2024 ini kita berencana melakukan pembenaan Objek Wisata Watugede akan tetapi kita membutuhkan proses yang sangat panjang dalam pengumpulan anggaran agar berjalan optimal kembali.” (wawancara 6 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa dalam pengelolaan wisata Watugede, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, belum menunjukan proses perencanaan yang matang. Pertemuan dengan pihak pengelola hanya sebatas pembuatan AD ART, selain itu belum ada langkah selanjutnya yang dilakukan yang berkenaan dengan upaya pengelolaan atau pembenaan kembali seperti yang diungkapkan Lurah. Perlu diperhatikan bahwasanya langkah yang harus dilakukan pemerintah beserta pihak pengelola dalam pengelolaan wisata Watugede adalah : *Pertama*, identifikasi dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi tahun 2020. Wabah ini mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Pembatasan aktivitas sosial dan perjalanan menyebabkan penurunan drastis jumlah pengunjung ke objek wisata Watugede. Hal ini berdampak pada ekonomi lokal, di mana sektor wisata menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat.

Selain itu juga terjadi penurunan aktivitas, yang mengakibatkan terbatasnya pengunjung pada setiap destinasi wisata. Karena terbatasnya pengunjung, aktivitas di tempat wisata seperti operasional fasilitas dan pelayanan masyarakat di sektor wisata terhenti. Dampak lainnya adalah

banyaknya masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor pariwisata harus mencari sumber pendapatan lain. *Kedua*, menentukan tujuan pengelolaan Wisata Watugede, selain pengumpulan anggaran, penting bagi pemerintah Kalurahan, membenah kembali infrastruktur agar dapat memudahkan para wisatawan mengakses tempat tersebut. Karena berdasarkan observasi peneliti di lapangan, ditemukan begitu memprihatinkan infrastruktur yang bisa mengakses ke Wisata Watugede tersebut. Karena akses ini dapat menarik perhatian pengunjung, juga sarana pendukung lainnya, seperti tempat istirahat, toilet, dan tempat parkir.

Ketiga, keterlibatan masyarakat, pada tahap perencanaan itu penting sekali masyarakat dilibatkan, dan juga berdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif, karena hal ini dapat memberi dampak baik bagi masyarakat dalam bidang sosial pun peningkatan prekonomian lokal. Untuk hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat setempat, mengenai keterlibatan mereka pada proses perencanaan pengelolaan wisata Watugede ini. Ketiga hal diatas tidak ditemukan oleh peneliti, baik saat wawancara dengan Lurah maupun pada pengamatan yang dilakukan. Kebingungan dalam menjawab pertanyaan wawancara oleh Lurah, menjadi dasar pandangan peneliti bahwa kurangnya persiapan pemerintah untuk pengelolaan wisata Watugede terutama pada tahap perencanaan.

Berikut wawancara dengan Widiyanto, salah satu tokoh Masyarakat;

“Untuk proses perencanaan terkait, penghidupan Kembali wisata yang telah mati itu, saya melihat masyarakat terlibat, masyarakat menyambut baik niat pemerintah Kalurahan untuk menghidupkan Kembali wisata

tersebut. Masyarakat turut serta dalam rapat rencana penghidupan Kembali wisata itu.”

Berkaitan dengan perencanaan, Ruslan Mudzakir sebagai carik di Kalurahan Watugede menyatakan bahwa:

“kalau rencana pembangunan objek wisata Watugede yang ada di Kalurahan Kedungpoh memang sudah ada sejak dulu mba, tetapi setahu saya sejak covid-19 kemarin sempat tidak berjalan karena larangan dari pemerintah untuk berkumpul atau ke tempat yang ramai ya. Objek wisata ini dulunya sebelum pandemi sudah ada tetapi pada saat itu belum ramai pengunjungnya dan pada saat itu juga pemerintah Kalurahan belum ada perhatian khusus kearah situ. Tetapi pada pertengahan tahun 2022 kemarin Lurah mulai mengumumkan bahwa objek wisata tersebut mau dihidupkan kembali dan meminta masyarakat untuk selalu membantu pemerintah jika sewaktu-waktu pemerintah Kalurahan memerlukan bantuan dari masyarakat.” (wawancara 7 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwasanya, untuk perencanaan, sudah dilakukan namun mengalami kendala diakibatkan wabah Covid-19. Dan telah diupayakan lagi untuk direvitalisasi, melalui penuturan oleh Lurah pada tahun 2022, serta meminta keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan rencana tersebut. Namun belum adanya bentuk perencanaan yang matang pun terstruktur untuk pengelolaan Wisata Watugede artinya penuturan tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk perencanaan pengelolaan wisata tersebut. Perlu adanya, identifikasi tujuan terkait pengelolaan, pembuatan keputusan terkait langkah yang perlu diambil, serta penyusunan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur seluruh kegiatan yang perlu dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan

rencana revitalisasi atau penghidupan kembali Wisata Watugede, pemerintah Kalurahan Kedungpoh, perlu membentuk pengorganisasian agar semua kegiatan dapat terelisasi dengan baik. Berdasarkan data hasil wawancara pun observasi yang dilakukan peneliti, pemerintah Kalurahan belum mengoptimalkan poin tersebut. Dan progres dari rencana yang telah dilakukan, belum sampai di tahap ini.

Wawancara bersama Suparman Selaku Kepala Dukuh Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, menyampaikan bahwa :

“Dalam pengelolaan objek wisata Watugede dalam sistem swadaya. Yang dimana pemerintah Kalurahan kedungpoh bersama dengan masyarakat desa selama ini berjalan dengan baik. Kemudian desa wisata tersebut berdiri dikarenakan oleh apresiasi masyarakat desa dalam berpartisipasi. Kemudian pemerintah Kalurahan di sini sebagai memfasilitasi dan mendukung apa yang di butuh kan oleh masyarakat desa dalam alokasi apapun itu. Di sini pemerintah Kalurahan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrembang desa (pong darwis) baik dalam segala program yang berkaitan dengan desa wisata Watugede melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (karang taruna). Kemudian, desa Watugede berdiri di tahun 2012 sebagai pendapatan kantong budaya dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari potensi desa tersebut. Gagasan ini lahir karena potensi desa itu sendiri kemudian di bantu oleh pemikiran dan masukan dari masyarakat desa bersama dengan pamong pemerintah Kalurahan lainnya. Kemudian, “segala urusan yang berkaitan dengan regulasi yang ada di atur oleh dinas kepariwisataan. Serta tidak dapat surat izin oprasional untuk membuat fasilitas bermain di sekitar wisata Watugede dari dinas pemerintah daerah”. (Wawancara, 6 juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa Pengelolaan objek wisata Watugede menggunakan sistem swadaya, yang berarti ada keterlibatan aktif antara pemerintah Kalurahan (desa) dan masyarakat setempat dalam pengelolaan. Dalam teori pengelolaan George Terry, pengorganisasian berfokus pada penataan sumber daya manusia dan material agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien.

Dalam konteks ini, pengorganisasian tampak pada pembentukan hubungan antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat yang saling mendukung dan berkolaborasi. Pemerintah Kalurahan berfungsi sebagai fasilitator dan penyedia dukungan, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan dan mendukung program yang ada. Masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan karang taruna, terlibat dalam proses musyawarah perencanaan (musrembang), yang menunjukkan keterbukaan dan kolaborasi dalam menyusun rencana pengelolaan objek wisata.

Pada dasarnya, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penugasan, dan koordinasi antar elemen yang terlibat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan bertindak sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat, terutama tokoh-tokoh dan kelompok seperti karang taruna, terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata Watugede. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan objek wisata ini dapat dicapai melalui pengorganisasian yang kolaboratif dan adaptif.

Selanjutnya wawancara dengan Riko selaku ketua karang taruna Padukuhan Sinom yang juga sebagai salah satu pihak pengelola Wisata Watugede ;

“Sejauh ini kami sedang berupaya untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Dengan begitu, ke depannya kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai kontribusi wisata terhadap pendapatan desa. Sejauh ini, belum ada data yang spesifik dan akurat mengenai besaran kontribusi langsung dari hasil pengelolaan Desa Wisata Watugede ke kas Kalurahan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum adanya sistem pembukuan yang terintegrasi dan komprehensif, sehingga sulit melacak aliran dana secara jelas. Selain itu, penggunaan dana yang fleksibel, seringkali langsung digunakan untuk operasional dan

pengembangan desa wisata, juga menjadi salah satu penyebabnya. Kurangnya evaluasi yang komprehensif mengenai dampak finansial dari pengembangan desa wisata turut memperumit upaya untuk mengukur kontribusi yang sebenarnya. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki situasi ini terus dilakukan. Dengan membangun sistem pembukuan yang terintegrasi, memberikan pelatihan kepada pengelola, dan melakukan audit internal secara berkala, diharapkan ke depannya dapat diperoleh data yang lebih akurat dan transparan mengenai kontribusi Desa Wisata Watugede terhadap kas Kalurahan. Dengan demikian, dapat dilakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk pengembangan desa wisata di masa mendatang "

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, perlu ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan, siapa yang mengevaluasi penggunaan dana, dan siapa yang mengawasi proses audit internal. Dalam teori *organizing* George R. Terry, pembagian tugas ini sangat penting agar setiap individu atau kelompok dalam organisasi memiliki peran yang jelas, yang memungkinkan efisiensi dan keteraturan dalam pencapaian tujuan. Tanpa pembagian yang jelas, pengelolaan yang baik akan sulit tercapai.

Organizing juga mencakup pengaturan sumber daya yang ada untuk mendukung keberhasilan rencana. Dalam konteks Desa Wisata Watugede, sumber daya yang paling terlihat adalah sumber daya manusia (pengelola desa wisata yang terlatih) dan sumber daya keuangan (anggaran untuk operasional dan pengembangan). Fungsi *organizing* berperan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya ini secara optimal agar tujuan pengelolaan wisata tercapai. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan dana yang fleksibel, yang sering kali digunakan untuk operasional dan pengembangan

tanpa pencatatan yang memadai. Oleh karena itu, *organizing* dalam hal ini juga mencakup pembuatan struktur yang memungkinkan dana dikelola lebih transparan dan terkontrol.

Upaya untuk melakukan audit internal secara berkala juga merupakan bagian yang terpenting pada pengorganisasian. Melalui audit internal, struktur pengelolaan yang ada dapat dievaluasi untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau jika ada penyesuaian yang diperlukan. Hal ini mencerminkan bahwa *organizing* bukan hanya soal menyusun struktur pada awalnya, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan struktur tersebut dan penyesuaian bila diperlukan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara optimal.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan agar anggota organisasi bekerja secara efektif dan efisien. George R. Terry menyatakan bahwa dalam tahap ini, manajer harus memastikan bahwa semua anggota kelompok bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut wawancara dengan Lurah,

“Saya selaku lurah akan berupaya membangun lagi di tahun 2025 yang akan datang ini. Untuk pengelolaan dana yang masuk dari objek wisata Watugede yang saya tau di kelolaan sepenuhnya oleh karang taruna yang ada di padukuhan sinom. Selama ini dana dari pengelolaan tersebut tidak masuk ke desa. Dalam pengelolaan objek wisata Watugede tidak berjalan aktif (vakum) dari tahun 2020-2023. Sehingga pada tahun 2024 ini kita melakukan pembenaan Objek Wisata Watugede akan tetapi kita membutuhkan proses yang sangat panjang dalam pengumpulan anggaran agar berjalan optimal kembali. Untuk keterlibatan masyarakat sendiri sangat pro-aktif tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa apabila objek wisata Watugede itu berjalan aktif akan menambah incam masyarakat yang ada sekitaran wilayah tersebut.”

Berdasar hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa, ada kebutuhan untuk proses panjang dalam pengumpulan anggaran agar pengelolaan objek wisata bisa berjalan optimal kembali. Fungsi *actuating* di sini berfokus pada bagaimana pemerintah Kalurahan dan karang taruna bisa bekerja sama untuk menggerakkan sumber daya manusia dan keuangan yang ada agar proses pengumpulan dana ini berjalan lancar.

Pemerintah Kalurahan sebagai pemimpin perlu memberikan pengarahan dan instruksi yang jelas, serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan anggaran, baik melalui sumbangan, kerja bakti, atau bentuk partisipasi lainnya. Selain itu, pengarahan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang terkumpul digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama. Adapun temuan lain dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan pihak Pemerintah Kalurahan yang justru terlihat kebingungan saat ditanya terkait perkembangan pengelolaan wisata. Hal tersebut peneliti menilai bahwa, adanya indikasi ketidakseriusan pemerintah dalam merealisasikan pengelolaan wisata tersebut. Data pendukung lain seperti Peraturan Kalurahan mengenai pengelolaan wisata Bukit Watugede hingga hari ini belum dibuat juga pengalokasian dana belum direalisasikan.

Selanjutnya wawancara dengan Ruslan Mudzakir selaku Carik Kalurahan Kedungpoh;

“pada pertengahan tahun 2022 kemarin Lurah mulai mengumumkan bahwa objek wisata tersebut mau dihidupkan kembali dan meminta masyarakat untuk selalu membantu pemerintah jika sewaktu-waktu

pemerintah Kalurahan memerlukan bantuan dari masyarakat. Penuturan tersebut tidak hanya konsep tetapi direalisasikan oleh Lurah bersama perangkatnya, buktinya pada saat ini objek wisata Watugede sudah mulai direnovasi oleh pemerintah Kalurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa Lurah telah melakukan langkah yang tepat dengan memberikan pengarahan dan motivasi yang kuat kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata Watugede. Tindakan nyata berupa renovasi objek wisata yang dimulai pada tahun 2024 menunjukkan komitmen dan memastikan bahwa rencana tersebut tidak hanya sebatas wacana. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap dan memberikan motivasi yang jelas, Lurah berhasil menciptakan suasana yang mendukung partisipasi aktif, yang penting untuk keberhasilan pengelolaan objek wisata ini di masa depan.

Selanjutnya Wawancara bersama Suparman Selaku Kepala Dukuh Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, menyampaikan bahwa:

“Dalam pengelolaan objek wisata Watugede dilakukan melalui sistem swadaya. Yang dimana pemerintah Kalurahan Kedungpoh bersama dengan masyarakat desa selama ini berjalan dengan baik. Kemudian destinasi wisata tersebut berdiri dikarenakan oleh apresiasi masyarakat Kalurahan dalam berpartisipasi. Kemudian pemerintah Kalurahan di sini sebagai fasilitator dan mendukung apa yang di butuhkan oleh masyarakat desa dalam alokasi apapun itu. Di sini pemerintah Kalurahan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrembang desa baik dalam segala program yang berkaitan dengan desa wisata Watugede melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (karang taruna).” (wawancara 6 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pemerintah Kalurahan Kedungpoh telah menjalankan fungsi pengarahan dan motivasi dengan baik. Pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata

watugede. Melalui keterlibatan masyarakat dalam musrembang, pengelolaan dana swadaya, dan peran aktif tokoh masyarakat dan karang taruna, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan objek wisata ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengarahan yang jelas dan motivasi yang terus-menerus akan membantu menjaga semangat gotong royong dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya wawancara dengan Riko selaku ketua karang taruna Padukuhan Sinom yang juga sebagai salah satu pihak pengelola Wisata watugede ;

“Sejauh ini kami sedang berupaya untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Dengan begitu, ke depannya kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai kontribusi wisata terhadap pendapatan desa. Sejauh ini, belum ada data yang spesifik dan akurat mengenai besaran kontribusi langsung dari hasil pengelolaan Desa Wisata Watugede ke kas Kalurahan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum adanya sistem pembukuan yang terintegrasi dan komprehensif, sehingga sulit melacak aliran dana secara jelas. Selain itu, penggunaan dana yang fleksibel, seringkali langsung digunakan untuk operasional dan pengembangan desa wisata, juga menjadi salah satu penyebabnya. Kurangnya evaluasi yang komprehensif mengenai dampak finansial dari pengembangan desa wisata turut memperumit upaya untuk mengukur kontribusi yang sebenarnya. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki situasi ini terus dilakukan. Dengan membangun sistem pembukuan yang terintegrasi, memberikan pelatihan kepada pengelola, dan melakukan audit internal secara berkala, diharapkan ke depannya dapat diperoleh data yang lebih akurat dan transparan mengenai kontribusi Desa Wisata Watugede terhadap kas Kalurahan. Dengan demikian, dapat dilakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk pengembangan desa wisata di masa mendatang. Sejauh ini juga belum ada alokasi dana dari Kalurahan untuk pengelolaan wisata ini menjadi tantangan besar kami dalam upaya pengelolaan.” (wawancara 6 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa pengelola destinasi wisata watugede menyadari adanya masalah dalam sistem pencatatan keuangan yang belum terintegrasi dan terorganisir dengan baik. Dalam hal ini, fungsi *actuating* berperan penting dalam memberikan pengarahan kepada pengelola untuk melakukan perbaikan pada sistem pencatatan keuangan tersebut. Lurah atau pengelola harus memberi instruksi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki sistem yang ada.

Riko juga mengharapkan salah satu solusi untuk memperbaiki sistem adalah dengan memberikan pelatihan kepada pengelola dan melakukan audit internal secara berkala. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, pengelola akan lebih siap untuk mengimplementasikan sistem pembukuan yang baru dan memantau aliran dana dengan lebih baik. Pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan pengelola dalam hal pengelolaan dana dan operasional yang efisien, sesuai dengan prinsip *actuating* yang menekankan pada pengelolaan yang optimal. Selain itu perlu adanya pengalokasian dana yang jelas untuk pengelolaan wisata dari pemerintah Kalurahan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi apakah aktivitas yang sedang dijalankan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan meliputi penentuan hasil yang ingin dicapai, pengukuran kinerja, dan identifikasi penyimpangan yang terjadi. wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Yusuf Efendi Selaku (Tata

Laksana) Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, menyampaikan bawah:

“Untuk wisata watugede tidak ada pengunjung serta aktivitas dari destinasi wisata tersebut tidak berjalan aktif. Kemudian yang paling banyak dikunjungi sekarang yaitu lumbu Mataram. Selain itu, pada tahun 2020 yang lalu, pembangunan jalan dilakukan. Akan tetapi, belum berjalan optimal sedangkan material sudah ada tersedia akan tetapi untuk upah tenaga kerjanya itu yang belum teralokasi. Selanjutnya, untuk sekarang belum dibuka objek wisata Watugede tersebut. Kemungkinan akan di buka setelah semua prosedur telah terpenuhi dengan baik. Saat ini pemerintah Kalurahan tidak membatasi apapun ketika memang ada pengunjung yang masuk akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang berkunjung lagi sampai saat ini. Untuk pengelolaannya pemerintah Kalurahan sangat melibatkan masyarakat secara regenerasi sampai regenerasi sekarang. Untuk pengelolaan tersebut di urus oleh pengurusan yang baru (karang taruna) tokoh masyarakat setempat yang ada di wilayah wisata Watugede. Untuk pembangunan jalan menuju ke destinasi Watugede berjalan optimal mungkin ada elemen yang hanya melihat secara sekilas saja ada yang rusak secara fasilitasnya saja mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya perancangannya masih saja belum diketahui cuman saya bisa jelaskan yang itu saja. mungkin lebih jelas dan terperinci bisa dijelaskan oleh Pak Dukuh Sinon”. (Wawancara 6 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa menyebutkan bahwa pengelolaan wisata watugede melibatkan masyarakat secara regenerasi, dengan pengelolaan yang sekarang diurus oleh pengurusan baru yang terdiri dari karang taruna dan tokoh masyarakat setempat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak pengelola atau pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan aktivitas pengelolaan desa wisata dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat setempat ini memerlukan pengawasan yang konsisten untuk memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan tujuan awal dan tidak terjadi penyimpangan.

Pembangunan jalan menuju destinasi watugede yang dilakukan pada tahun 2020 namun belum berjalan optimal mencerminkan kurangnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur tersebut. Meskipun material sudah tersedia, namun alokasi upah tenaga kerja yang belum terealisasi menjadi kendala. Pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah Kalurahan dan pengelola desa wisata diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dialokasikan dengan tepat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat selesai sesuai rencana dan mendukung pengembangan objek wisata.

Meskipun saat ini belum ada pembatasan terhadap pengunjung yang masuk ke Desa Wisata Watugede, namun faktanya tidak ada pengunjung yang datang. Dalam hal ini, pengawasan lebih kepada evaluasi terhadap daya tarik wisata dan kemampuan manajemen dalam mengelola aliran pengunjung. Pemerintah dan pengelola perlu mengawasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung, seperti promosi, fasilitas yang memadai, serta kesiapan operasional yang lebih optimal. Pengawasan terhadap faktor-faktor ini perlu dilakukan agar bisa diketahui penyebab ketidakaktifan dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Ditemukan juga mencatat bahwa perancang pembangunan wisata dan pengelolaan Desa Wisata Watugede belum diketahui dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kejelasan dalam struktur pengelolaan dapat menghambat pengawasan yang efektif. Terdapat juga pengamatan bahwa fasilitas jalan menuju objek wisata watugede mengalami kerusakan, meskipun pembangunan jalan sudah dilakukan. Dalam konteks pengawasan, ini

menunjukkan bahwa ada kurangnya pemantauan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah dibangun. Pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada tidak hanya dibangun dengan baik, tetapi juga dipelihara dengan baik agar bisa mendukung aktivitas wisata yang berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara Widiyanto sebagai salah satu masyarakat yang ada di Kalurahan Kedungpoh menyatakan bahwa :

“Di sini saya sendiri sebagai masyarakat Kalurahan kedungpoh bersama masyarakat lainnya sangat mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan, ini juga sebagai bentuk penghidupan kembali apa yang sudah lama mati dan masyarakat dengan senang hati membantu pemerintah dalam hal apapun.”

Berdasarkan wawancara di atas tersebut menunjukkan adanya dukungan aktif dari masyarakat terhadap program pemerintah Kalurahan. Ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam mendukung dan menjalankan program-program yang ada. Dalam teori peluang George R. Terry, pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga keberhasilan program. Masyarakat yang terlibat secara aktif memberikan pengawasan informal yang berguna untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Keterlibatan masyarakat ini dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan eksternal yang membantu mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang mungkin tidak terlihat oleh pihak pengelola.

Dukungan masyarakat dalam bentuk penghidupan kembali program yang sudah lama mati mencerminkan adanya kesadaran dan keinginan untuk melihat kemajuan di desa mereka. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan masyarakat lebih bersifat preventif dan berbasis partisipasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan rasa memiliki terhadap program akan lebih peduli terhadap kualitas dan kemajuan program tersebut. Ini membantu menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat dapat memantau pelaksanaan program dan memberikan umpan balik kepada pemerintah jika ada aspek yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bisa menjadi kontrol sosial yang efektif.

Dukungan masyarakat yang bersemangat untuk membantu pemerintah juga mencakup peran penting dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme seperti rapat warga, survei masyarakat, atau forum diskusi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan mengenai program yang telah dijalankan. Pemerintah kemudian bisa menggunakan umpan balik ini untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian guna meningkatkan efektivitas program di masa depan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan Wisata Watugede sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan elemen terkait lainnya. Pembenahan infrastruktur, peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, serta pengawasan yang lebih ketat adalah langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk

mengoptimalkan potensi wisata ini. Keberlanjutan pengelolaan wisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemeliharaan fasilitas yang baik akan menjadikan Wisata Watugede sebagai salah satu destinasi wisata yang berkembang di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis tentang Upaya Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watugede dapat disimpulkan dan berdasarkan teori pengelolaan menurut George Terry yang menekankan pada empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), pengelolaan Wisata Watugede dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede, telah membuat AD ART sebagai acuan dasar pengelolaan wisata Bukit Watugede. Namun, perencanaan tersebut masih jauh dari kesempurnaanya, hal ini bisa dilihat dari belum adanya peraturan kalurahan untuk wisata tersebut, pengalokasian dana untuk pengelolaan wisata belum jelas. Dengan ini peneliti menilai bahwa perencanaan pengelolaan wisata Bukit Watugede belum dilakukan secara matang dan terstruktur.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengelolaan Wisata Watugede melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kalurahan, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Secara

pengorganisasian dapat dilihat melalui AD ART, yang mana pihak pemerintah Kalurahan bertanggungjawab sebagai pelindung dan penasehat sedang pihak pengelola adalah masyarakat yang telah mendaftarkan diri dan telah tercatat dalam struktur Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede. Penetapan struktur serta pembagian sumberdaya sudah jelas dan tertera di AD ART.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Proses pelaksanaan di Wisata Watugede mencerminkan kolaborasi yang baik antar pihak. Dalam merealisasikan perencanaan pengelolaan wisata, pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam revitalisasi sektor wisata pasca-pandemi dan hal tersebut fokus pada peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, serta pembenahan fasilitas pendukung.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menunjukkan bahwa implementasi program berjalan dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, sangat berbeda dengan pihak Pemerintah yang justru menunjukkan kebingungannya saat ditanya terkait perkembangan pengelolaan wisata, hal ini menunjukan bahwa keterlibatan pemerintah masih pasif dalam pengelolaan wisata Watugede. Ditemukan jugabeberapa tantangan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terkendala oleh pengawasan yang lemah dan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terhadap pengelolaan Wisata Watugede perlu

ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan. Evaluasi berkala dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan. Ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran dan keterlambatan proyek menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan Wisata Watugede:

1. Perencanaan yang Lebih Mendalam

Pemerintah Kalurahan dengan Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watugede perlu melakukan perencanaan yang lebih komprehensif, mulai dari identifikasi tujuan terkait pengelolaan, pembuatan keputusan terkait langkah yang perlu diambil, serta penyusunan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu juga penyusunan anggaran yang jelas dan transparan, serta strategi promosi yang terencana dengan baik, dapat menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan desa. Melibatkan ahli atau konsultan dalam perencanaan keuangan dan pemasaran wisata dapat membantu memperkuat kualitas perencanaan.

2. Peningkatan Pengawasan terhadap Infrastruktur dan Penggunaan Anggaran

Pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang disetujui. Menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi untuk memantau progres proyek secara real-time, dapat membantu mencegah keterlambatan dan ketidaksesuaian anggaran. Pengawasan juga harus melibatkan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Peningkatan Kolaborasi dan Komunikasi

Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan dengan pihak pengelola yaitu Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watuged beserta pihak terkait lainnya seperti sektor swasta atau LSM, akan mempercepat pencapaian tujuan bersama. Pemerintah Kalurahan dapat mengadakan forum komunikasi rutin yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dita. (2018, April 27). *Eloknya Panorama Bukit Watu Gede, Sepi Pengunjung Karena Vakum*. Diambil kembali dari Sorot gunungkidul: <https://gunungkidul.sorot.co/berita-96310-eloknya-panorama-bukit-watu-gede-sepi-pengunjung-karena-vakum.html>
- Eko Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko Sutoro. (2021). Government Making membuat ulang ilmu pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1-20.
- Hasmiati. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Desa Kayuangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 1-9.
- Hidayat, A. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality* , 1-10.
- Koentjaraningrat, R. M. (1975). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumastuti, D. W. (2018). *Pariwisata Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Larasati, D. C., & Kurrahman, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi* , 2-7.
- Larasati, D. C., & Kurrahman, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi* , 2-7.
- Lina Kumala Dewi, ,. E. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Lokal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Galih Pangestu, R. P. (2017). Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim* , 5-14.
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan objek wisata air panas guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pades) di desa cikupa kecamatan banjaranyar kabupaten ciamis. *Jurnal Moderat*, 1-11.
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 1-13.

- Mukhirto, A. D. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*.
- Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Galih Pangestu, R. P. (2017). Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 5-14.
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 1-11.
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 1-13.
- Mukhirto, A. D. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*.
- Prayitno, D. A. (2019). *Manajemen Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Puspantari, K. A. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Wisata Besan Kabupaten Klungkung. *Journal of Contemporary Public Administration*, 43-49.
- Rachmawati, I. N. (2019). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah*, 1-15.
- Sefira Ryalita Primadany, M. R. (2013). analisis strategi pengembangan pariwisata daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Soekanto, S. (2015). *Otonomi Desa dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Y. (2017). *Keuangan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiman. (2018). pemerintahan desa. *Jurnal Binamulia*, 1-14.
- Tomi. (2023, 11 27). *Pergantian Nomenklatur Desa Menjadi Kalurahan*. Diambil kembali dari Krjogja.com: <https://www.krjogja.com/sleman/1242507540/pergantian-nomenklatur-des-menjadi-Kalurahan>
- Waridah, S. (2016). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1-13.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4891.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Kalurahan Kedungpoh No. 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Foto Kegiatan Masyarakat Kalurahan Kedungpoh Untuk Membahas Tentang Objek Wisata Watugede







2. Foto Dokumentasi Wawancara



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Mugiharto Selaku Kepala Lurah
Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Yusuf Efendi selaku KA. Kasi Tata
Usaha Dan Umum Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Wandi selaku Masyarakat Padukuhan
Sinom, Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Senioto selaku Ketua RT 01
Padukuhan Sinom, Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Sukardi selaku Masyarakat Padukuhan
Sinom, Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Bapak Riko selaku Ketua Karang Taruna
Padukuhan Sinom, Kalurahan Kedungpoh**



**Wawancara Bersama Dengan Ibu Firda selaku Anggota Karang Taruna
Padukuhan Sinom, Kalurahan Kedungpoh**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam mengelola objek wisata watugede ?
2. Bagaimana Pemerintah Kalurahan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan objek wisata watugede ?
3. Apakah terdapat forum atau pertemuan rutin antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat terkait kebijakan pengelolaan objek wisata watugede ?
4. Bagaimana mekanisme feedback dari masyarakat kepada pemerintah Kalurahan dalam konteks pengelolaan objek wisata watugede ?
5. Apakah terdapat program pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran objek wisata watugede ?
6. Bagaimana pemerintah Kalurahan memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam keputusan terkait infrastruktur dan fasilitas objek wisata watugede ?
7. Apakah terdapat inisiatif pemerintah Kalurahan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata watugede ?
8. Bagaimana pemerintah Kalurahan mengatasi konflik atau perbedaan pendapat antara pihak pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan objek wisata watugede ?
9. Bagaimana pemerintah Kalurahan mengukur kepuasan masyarakat terkait pengelolaan objek wisata watugede ?

10. Apakah terdapat program pelatihan atau penyuluhan dari pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tanggung jawab terkait objek wisata watugede ?
11. Apa langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah Kalurahan untuk memastikan pembangunan objek wisata watugede berkelanjutan ?
12. Bagaimana pemerintah Kalurahan menjaga dan mempromosikan pelestarian budaya lokal dalam konteks pengelolaan objek wisata watugede ?
13. Apakah pemerintah Kalurahan memiliki kebijakan khusus terkait penggunaan sumber daya alam dalam pengembangan objek wisata watugede ?
14. Bagaimana pemerintah Kalurahan melibatkan masyarakat dalam program konservasi lingkungan terkait objek wisata watugede ?
15. Apakah terdapat insentif atau penghargaan dari pemerintah Kalurahan untuk masyarakat yang aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata watugede ?
16. Bagaimana pemerintah Kalurahan menangani isu-isu keberlanjutan seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi di objek wisata watugede ?
17. Apakah terdapat program pengembangan kapasitas bagi masyarakat terkait dengan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam konteks objek wisata watugede ?

18. Bagaimana pemerintah Kalurahan melibatkan pemuda dan generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan keberlanjutan objek wisata watugede?
19. Apakah pemerintah Kalurahan memiliki kebijakan atau regulasi terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait objek wisata watugede ?

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

PROFIL KELOMPOK

1. Nama Ketua Kelompok : Pengelola wisata Bukit Watu Gede
2. Alamat Sekretariat : Sinom RT 06/05 Kalurahan Kedungpoh
3. Tanggal berdiri : 12 Juni 2012
4. Nama Ketua : Sunarno
5. Penanggungjawab : Dwiyono (Lurah Kedungpoh)
6. Penasehat : Suparman (Dukuh Sinom)
7. Kontak Person : 081802640865 / 0817276371
8. Jumlah Anggota : 25 orang
9. Ruang lingkup Kegiatan : Mengelola lokasi wisata Bukit Watu Gede Sinom
Kedungpoh Nglipar Gunungkidul

Kelompok Pengelola Wisata
"Bukit Watu Gede"
Ketua Kelompok



ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Kelompok Pengelola wisata "Bukit Watu Gede "

Pasal 2

Tanggal Berdiri

Kegiatan Wisata Bukit Watu Gede berdiri pada tanggal 12 Juni 2012
Atas dasar musyawarah bersama demi kelestarian Potensi Sumber daya alam sebagai acuan
kelangsungan kegiatannya

Pasal 3

Tempat Kegiatan

Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watu Gede berkegiatan di Padukuhan Sinom RT 06/05
Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Asas

Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watu Gede berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945

Pasal 5

Sifat

Kelompok ini bersifat terbuka dan independen

BAB III

STATUS

Pasal 6

Status

Kelompok Pengelola Wisata Bukit Watu Gede yang fokus pada pelestarian, pengembangan
dan pemanfaatan potensi Wisata Alam yang statusnya diakui oleh Pemerintah dan
mendapatkan perlindungan hukum

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Definisi Keanggotaan

Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede beranggotakan warga Kalurahan Kedungpoh yang secara sadar mendaftarkan diri untuk bergabung dan berperan aktif didalam kegiatan tersebut.

Pasal 8

Kategori Anggota

Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede yang anggotanya terdiri dari para pemuda Pemuda dan dewasa

BAB V
KEORGANISASIAN

Pasal 9

Struktur Koordinator Organisasi

Struktur Organisasi dan Koordinasi Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Kalurahan kedungpoh terdiri atas Penanggungjawab, Penasehat, Ketua , Sekretaris , Bendahara, Bidang dan anggota sesuai dengan kebutuhan Paguyuban.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 10

Jenis-jenis Permusyawaratan

Rapat-rapat Permusyawaratan Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Pertemuan Rutin tiap 3 (tiga) bulan 1x dan pertemuan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 11

Definisi Permusyawaratan

Yang dimaksud Permusyawaratan Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan keluar organisasi

Pasal 12

Hirarki Permusyawaratan

Permusyawaratan tertinggi berada di Rapat Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Koordinasi dan keputusan bersama dalam musyawarah dan mupakat

Pasal 13

Keuangan

1. Keuangan Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Padukuhan sinom Kalurahan Kedungpoh dikelola dengan prinsip halal, transparan, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
2. Keuangan Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Padukuhan Sinom Kalurahan Kedungpoh diperoleh dari sumber-sumber keuangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, Retribusi Parkir, donasi para donatur, sponsor serta sumbangan-sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat serta melanggar aturan yang ada.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Padukuhan Sinom Kalurahan Kedungpoh dapat dilakukan apabila perubahan tersebut disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota pengurus yang hadir di Rakor Pengurus
2. Penetapan Anggaran Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Padukuhan Sinom Kalurahan Kedungpoh dilakukan melalui Rakor Pengurus

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Aturan Tambahan

Hal yang belum diatur, ditetapkan ataupun dirinci dalam anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Kedungpoh , pada tanggal, 12 juli 2020



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 1

Pengertian

Anggota Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Anggaran Dasar adalah setiap warga Kalurahan Kedungpoh yang secara sadar mendaftarkan diri dan dipilih untuk bergabung dan berperan aktif di dalam kelompok

Pasal 2

Jenis anggota

Anggota Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Kalurahan Kedungpoh setiap warga Kalurahan yang mendaftarkan diri menjadi pengurus serta berperan aktif dalam kelembagaan kelompok

Anggota terdiri dari kelompok laki-laki dan Perempuan

Pasal 3

Jenjang Keanggotaan dan Pengurus

Jenjang keanggotaan Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede adalah anggota, dan Pengurus

BAB II

Syarat-syarat Keanggotaan dan Pengurus

Pasal 4

Persyaratan Keanggotaan dan Pengurus

1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah :
 - a. Warga Kalurahan Kedungpoh yang mengajukan diri menjadi anggota Hadroh tanpa paksaan dari pihak manapun
 - b. Keanggotaan tidak terbatas usia, dan masa bakti pengurus 5 tahun
2. Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB III

MASA KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 5

Masa keanggotaan dan Pengurus

1. Keanggotaan dan Pengurus berakhir karena :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan atau dipecat karena sesuatu hal melalui musyawarah dan mufakat

2. Masa bakti Pengurus adalah 5 (lima) tahun sejak diwakilkannya tergabung dan dipilih serta ditetapkan menjadi anggota dan Pengurus Sanggar Seni dan selanjutnya dapat mengajukan dan dipilih kembali sampai pada batas yang ditentukan sesuai pasal 4 ayat (1) huruf b

Pasal 6

Hak Anggota dan Pengurus

1. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk dipilih
2. Pengurus mempunyai hak mengadakan agenda darurat, mengajukan Pertemuan Luar Biasa, serta memutuskan secara sepihak dan memberhentikan pengurus yang tidak dapat menjalankan amanahnya, melalui pertimbangan Pembina dan Penasehat.

Pasal 7

Kriteria Anggota dan Pengurus

1. Anggota terdiri dari semua warga masyarakat yang memiliki komitmen untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya khususnya seni Hadroh atau seni Tradisional.
2. Pengurus terdiri dari beberapa unsur yang tidak mengikat, taat pada Panca Sila dan UUD 45 serta peduli terhadap Seni Budaya

Pasal 8

Kewajiban Anggota dan pengurus

1. Anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas dan adab pancasila dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi
 - b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
2. Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi etika, sopan, santun, dan moralitas dalam berperilaku, dan menjalankan aktivitas organisasi.
 - b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya.
 - c. Mendukung kegiatan organisasi
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai perannya masing-masing

BAB IV
RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN

Pasal 9

Rangkap Anggota dan Jabatan

1. Dalam keadaan tertentu anggota dan pengurus Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Kalurahan kedungpoh dapat merangkap menjadi anggota Kelompok lain atas persetujuan Pembina, Penasehat, dan ketua Umum.
2. Anggota dan pengurus Kelompok pengelola Wisata Bukit Watu Gede Kalurahan Kedungpoh yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar harus menyesuaikan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Kelompok lainnya.

BAB V
SANKSI ANGGOTA

Pasal 10

Sanksi

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota.
2. Anggota mendapat sanksi karena :
 - a. Melalaikan tugas organisasi
 - b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus
 - c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Paguyuban
 - d. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
3. Jenis-jenis sanksi :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Skorsing
 - d. Pemberhentian
 - e. Atau bentuk lain yang ditentukan oleh koordinator dan diatur dalam ketentuan tersendiri
4. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang diadakan oleh majelis permusyawaratan

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Kedungpoh , pada tanggal 12 Juli 2020

Mengetahui,
Lurah Kedungpoh



DWIYONO

Kelompok Pengelola Wisata
"Bukit Watu Gede"
Ketua Kelompok



SUNARNO

DAFTAR ANGGOTA DAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA WISATA
BUKIT WATUGEDE
PADUKUHAN SINOM KALURAHAN KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	DWIYONO (Lurah Kedungpoh)	L	Pelindung
2	SUPARMAN	L	Penasehat
3	SUNARNO	L	Ketua I
4	SUGIYO	L	Ketua II
5	PRIYO NUGROHO	L	Sekretaris I
6	EKO PRASETYO	L	Sekretaris II
7	YUSUF EFENDI	L	Bendahara I
8	SUTAR	L	Bendahara II
9	SURADI	L	Bidang Sarana Prasarana
10	RAHMAD TRIYONO	L	Bidang Sarana Prasarana
11	SUDIYONO	L	Bidang Humas
12	SUGIYANTO	L	Bidang Humas
13	SUPADI	L	Biadng Logistik
14	RUBIYONO	L	Bidang Logistik
15	HARI SETYAWAN	L	Bidang Keamanan
16	SUMYAR	L	Bidang Keamanan
17	TUGIMIN	L	Bidang Keamanan
18	KHOIRIYATUL AFFRIDA	P	Anggota
19	FAIGAH QOTRUN NADA	P	Anggota
20	ALFIAH NUR FATIMAH	P	Anggota
21	FARIDATUL HIDAYAH	P	Anggota
22	ARINA SALSABILA	P	Anggota
23	ANGGITA NUR FADLILAH	P	Anggota
24	IFANA ROSISA NAFISA	P	Anggota
25	NABISA ANAS TASYA	P	Anggota

Mengetahui,
Lurah Kedungpoh

DWIYONO

Kelompok Pengelola Wisata
"Bukit Watu Gede"
Ketua Kelompok

SUNARNO

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 093/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
No. Mahasiswa	: 20520154
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 18 Oktober 2023
Judul Proposal	: Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Budaya untuk Peningkatan (PADes) di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul.

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Dr. Rijel Samaloisa

PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI SARJANA: KEMUKAKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI SARJANA: KEMUKAKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI SARJANA: KEMUKAKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI SARJANA: KEMUKAKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 509/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
No Mhs : 20520154
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Tempat : Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

SURAT TUGAS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA

• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA
• PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN DESA

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989. website: www.apmd.ac.id e-mail: info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 255/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Christine Cecilia Stefanie Ute Dolorosa
Nomor Mahasiswa : 20520154
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Upaya Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek
Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

SURAT BALASAN DARI KALURAHAN KEDUNGPOH



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦫꦂ

Jln Nglipar-Ngawen Km 3, Gojo, Kedungpoh Pos : 55852
Posel : <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id> Laman :
www.desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id

Kedungpoh, 30 Juli 2024

Kepada

Nomor : 400.3/118
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pemberian ijin penelitian

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat (APMD) Yogyakarta
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, menerangkan bahwa:

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : CHRISTINE CECILIA STEFANIE UTE DOLOROSA |
| 2. No Mhs | : 20520154 |
| 3. Program Studi | : ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Judul Skripsi | : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA |
| 5. Tempat | : KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA |
| 6. Dosen Pembimbing | : DRA.SAFITRI ENDAH WINARTI, M.SI |

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provindi DIY memberikan Ijin Penelitian kepada Mahasiswa tersebut.

Kedungpoh, 30 Juli 2024

An. LURAH,
CARIK



RUSLAN MUDZAKIR



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 -- Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christine Cecilia Stepanie Ute Dolorosa
No Mahasiswa : 20520154
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kelurahan Kedungpoh Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watu Gede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Dosen Pembimbing : Dra. Sapitri Endah Winarti, M.Si.
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
05/12/23	*) Perbaiki judul → Judul menjadi: Upaya Pemerintah Kelurahan Kedungpoh Dalam Pengelolaan Objek Wisata Watu Gede Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	ky
7/12/23	Revisi proposal	ky
10/01/24	Revisi proposal	ky
25/01/24	Revisi proposal	ky
12/03/24	Revisi proposal	ky
21/04/24	Revisi proposal	ky
1/05/24	Revisi proposal	ky
20/06/24	Revisi proposal	ky
5/07/24	acc proposal	ky
5/08/24	Revisi skripsi	ky

7/08/24	Revisi skripsi	hij
22/08/24	Revisi skripsi	hij
28/08/24	Revisi skripsi	hij
16/10/24	Revisi skripsi	hij
10/11/24	Revisi skripsi	hij
22/11/24	Revisi skripsi	hij
16/12/24	acc skripsi	hij

Mengetahui / Menyetujui

Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

hij
Dra. Safitri Endang Winarti, M.Si.



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Setelah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokaran Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7520-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: CHRISTINE CECILIA STEFANIE UTE DOLOROSA
Judul makalah: PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA WATUGEDE UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA

Tanggal pemeriksaan: 3 Februari 2025
Persentase plagiasi: 28 %



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

